

LAPORAN

KINERJA

KOTA MADIUN



2019

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun
Tahun 2020



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Madiun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Madiun, 17 April 2020

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199003 2 003



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Madiun tahun 2019 telah berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang seharusnya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2019 merupakan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan ketidakberhasilan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Selain itu Laporan Kinerja merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Pemerintah Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal dari masing-masing indikator kinerja.



Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan, maupun dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka masukan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya *good governance* di Kota Madiun.

Madiun, April 2020

**WALIKOTA MADIUN**
Drs. H. MAIDI, SH., MM, M.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	KP-1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Gambaran Umum Daerah.....	I-3
1. Kondisi Geografis	I-3
2. Kondisi Demografis	I-5
3. Kondisi Makro Ekonomi	I-9
D. Isu Strategis	I-16
F. Sistematika	I-18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019	II-2
1. Visi	II-3
2. Misi	II-5
3. Tujuan Pembangunan	II-6
4. Sasaran Pembangunan	II-7
B. Perjanjian Kinerja	II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	III-2
1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja	III-2
2. Hasil Pengukuran Kinerja	III-3
3. Evaluasi dan Analisis Realisasi kinerja	III-5
B. Akuntabilitas Keuangan	III-58
BAB IV PENUTUP	IV-1



A. Kesimpulan	IV-1
B. Permasalahan	IV-2
B. Upaya Meningkatkan Kinerja	IV-4



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan tahun 2015-2019	I-7
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Kota Madiun menurut Tingkat Pendidikan	I-7
Tabel I.4	Jumlah Penduduk Kota Madiun menurut Jenis Pekerjaan	I-8
Tabel I.5	Jumlah Penduduk	II-5
Tabel II.4	Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD	II-6
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja	II-8
Tabel III.1	Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	III-2
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	III-3
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan	III-4
Tabel III.4	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	III-6
Tabel III.5	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	III-8
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	III-11
Tabel III.7	Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Permukiman dan Prasarana Transportasi Kota	III-14
Tabel III.8	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-16



Tabel III.9	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	III-19
Tabel III.10	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Koperasi, UMKM, Perdagangan, Pariwisata, dan Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	III-20
Tabel III.11	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	III-24
Tabel III.12	Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerukunan Dalam Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya	III-26
Tabel III.13	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	III-27
Tabel III.14	Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2015	III-29
Tabel III.15	Penyerapan Anggaran per sasaran sesuai APBD Tahun 2015	III-29
Tabel III.16	Efisiensi Anggaran Belanja per sasaran tahun 2015	III-31



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Kota Madiun	I-3
Gambar I.2	Luas Wilayah Kota Madiun per Kecamatan	I-4
Gambar I.3	Data Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	I-6
Gambar I.4	Jumlah RW dan RT di Kec. Manguharjo	I-4
Gambar I.5	Luas wilayah, Jumlah RW, RT di Kec. Taman	I-5
Gambar I.6	Luas wilayah, Jumlah RW, RT di Kec. Kartoharjo	I-5
Gambar I.7	Data Penduduk Kota Madiun	I-6
Gambar I.8	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2015	I-6
Gambar I.9	Kelompok Penduduk Usia Tidak Produktif	I-8
Gambar 1.10	Grafik Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif	I-9
Gambar I.11	Rasio Ketergantungan	I-9
Gambar I.12	Perkembangan PDRB Kota Madiun	I-10
Gambar I.13	Kontribusi sektoral (%) PDRB Kota Madiun Tahun 2014	I-11
Gambar I.14	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun	I-12
Gambar I.15	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2009 - 2014	I-12
Gambar I.16	Perkembangan Indeks Pendidikan, Kesehatan, dan PPP Kota Madiun Tahun 2009 - 2014	I-13
Gambar I.17	Sistem Aplikasi E-SAKIP	I-16
Gambar I.18	Cascading, Maping Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	I-17
Gambar III.1	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun Tahun 2012 - 2015	III-5
Gambar III.2	Perkembangan Nilai Hasil EKPPD Kota Madiun Tahun 2010 - 2014	III-6
Gambar III.3	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun tahun 2012-2016.....	III-7



Gambar III.4	Walikota Madiun menyerahkan bantuan pendidikan kepada siswa tidak mampu	III-9
Gambar III.5	Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2011-2015	III-9
Gambar III.6	Perkembangan angka usia harapan hidup Kota Madiun tahun 2011-2015.....	III-11
Gambar III.7	Perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kota Madiun tahun 2012-2016.....	III-12
Gambar III.8	Perkembangan angka kematian bayi di Kota Madiun 2012-2016	III-13
Gambar III.9	Peletakan Batu Pertama oleh Walikota Madiun dalam Rangka Program RTLH.....	III-15



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.



Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2019, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2014-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Madiun dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Madiun.



Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Madiun;
2. Menjadikan Pemerintah Kota Madiun yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Madiun guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Madiun terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Madiun.

C. Gambaran Umum Daerah

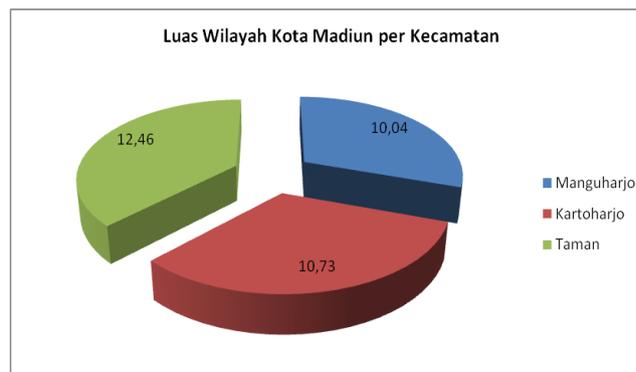
1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempunyai letak yang strategis karena menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah di pulau Jawa. Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat.

Gambar I.1. Peta wilayah Kota Madiun

Secara astronomis, Kota Madiun terletak antara 7° - 8° Lintang Selatan dan antara 111° - 112° Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kota Madiun berbatasan dengan Kecamatan Jwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Pada masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga total di Kota Madiun terdapat 27 Kelurahan.

Gambar I.2. Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan

Sumberdata : Kota Madiun Dalam Angka 2019

Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut (dpl) atau elevasi, Kecamatan Manguharjo berada pada 76 m dpl, Kecamatan Taman 77 m dpl, dan Kecamatan Kartoharjo 68 m dpl.

Rata-rata suhu udara selama tahun 2018 di Kota Madiun adalah antara 23,23-25,00° C . Penyinaran matahari paling tinggi persentasenya terdapat di bulan September sedangkan kecepatan angin paling besar terjadi di Bulan Oktober sebesar 66,67 knot.

Pengukuran curah hujan dilakukan di 4 (empat) stasiun. Masing-masing adalah Stasiun Kantor UPT, Stasiun PG Kanigoro, Stasiun PG Rejoagung dan Stasiun Klegen. Dari keempat stasiun tersebut, tercatat bahwa tidak ada hari hujan di Bulan Juli sampai dengan Oktober 2018.

Jumlah hari hujan terbanyak yaitu 19 hari, terjadi pada bulan Maret, tercatat di Stasiun Klegen. Sementara itu rata-rata curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun PG Kanigoro, juga di bulan Maret, sebesar 27,08 mm³/hari.

2. Kondisi Demografis

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 210.115 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.748 jiwa, Kecamatan Manguharjo 63.017 jiwa, dan Kecamatan Taman 89.350 jiwa.

Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

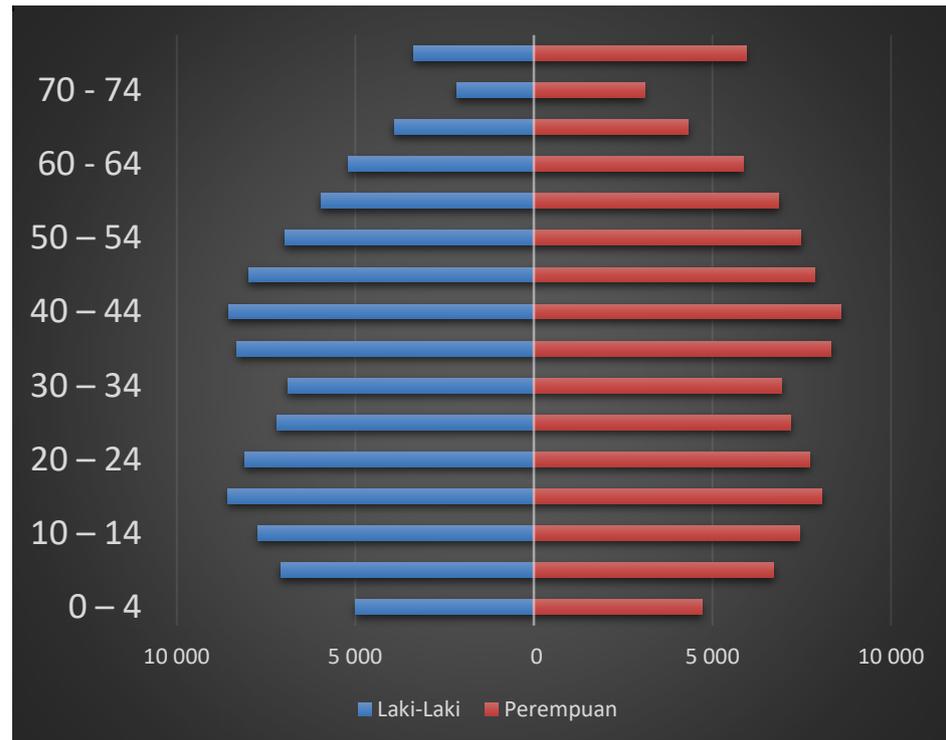
Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kartoharjo	57.777	58.147	57.985	57.927	57.748
2	Manguharjo	62.276	62.877	62.879	62.801	63.017
3	Taman	88.195	89.013	88.945	89.069	89.350
	Total	208.248	210.037	209.809	209.797	210.115

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Sedangkan rincian data jumlah penduduk Kota Madiun berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar I.3. Data Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Persebaran penduduk serta perbandingan antara penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan di Kota Madiun adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini. Sebagaimana terlihat pada grafik, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara banyaknya penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan.

Hal ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk pria maupun wanita cukup merata diseluruh wilayah masing-masing kecamatan. Dengan persebaran yang relatif merata, diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena diharapkan tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang terlalu besar antara masing-masing kecamatan.

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 73.045 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 498 jiwa; D-III 5.761 jiwa; S-1 29.071 jiwa; S-2 1.391 jiwa, dan S-3 35 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel I. 3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 s/d 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	30.989	31.740	32.430	31.258	31.374
Tidak Tamat SD;	18.575	18.695	18.755	19.575	19.887
Tamat SD;	32.950	32.318	30.919	30.169	29.266
Tamat SLTP;	30.155	30.342	29.836	29.487	28.787
Tamat SLTA;	69.799	70.756	71.494	72.405	73.045
Tamat D-I/II;	440	439	452	468	498
Tamat D-III;	5.507	5.557	5.566	5.639	5.761
Tamat S-1;	18.608	18.929	19.065	19.431	20.071
Tamat S-2;	1.205	1.238	1.268	1.334	1.391
Tamat S-3.	20	23	24	31	35

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun



Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. 4. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015 s/d 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
1. Belum/Tidak Bekerja	38.404	35.539	38.358	36.721	36.390
2. Mengurus Rumah Tangga	34.603	35.328	34.773	34.965	34.412
3. Pelajar/Mahasiswa	43.581	45.352	44.032	45.119	44.940
4. Pensiunan	6.374	6.399	6.270	6.237	6.095
5. PNS	7.379	7.396	7.204	6.992	6.826
6. TNI	1.850	1.942	1.830	1.806	1.771
7. POLRI	1.048	1.057	1.039	1.040	1.027
8. Jasa	8.608	9.105	8.951	8.449	8.449
9. Karyawan	42.126	43.735	43.557	44.679	46.311
10. Buruh	5.082	4.690	4.578	4.489	4.390
11. Wiraswasta	18.727	19.060	18.826	18.945	18.994
12. Lain-lain	466	434	391	355	510

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0 - 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan daya saing yang merupakan indikator perbandingan jumlah penduduk usia dibawah 15 tahun dengan penduduk usia 64 tahun keatas dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2019 di Kota Madiun ditargetkan sebesar 44,79 % dengan realisasi 42,09 %, dibanding dengan realisasi tahun 2018 sebesar 43,08 % dan mengalami penurunan sebesar 0,9 %. Untuk tahun 2019, rasio ketergantungan dapat dianalisa dengan perhitungan sebagai berikut, jumlah penduduk usia 0 tahun sampai dengan jumlah penduduk usia 14 tahun ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dibanding jumlah penduduk usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun dikali seratus. Dimana jumlah penduduk usia 0 tahun sampai usia 4 tahun sebanyak 30.073 orang ditambah jumlah penduduk usia 65 tahun keatas sebanyak 62.859 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun sebanyak 147.256 orang.

3. Kondisi Makro Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pada kedudukan, fungsi dan peranan Kota Madiun sebagai subsentra pengembangan Wilayah Jawa Timur di bagian barat, luas wilayah yang relatif kecil, serta dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki, Kota Madiun lebih menitikberatkan pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa, baik jasa pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor itulah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun.

Perkembangan PDRB di Kota Madiun mulai tahun 2014 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel I.5. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Kota Madiun

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	74 218.27	75 389.76	76 374.63	75 018.38	76 353.37	75,634.00
B	Pertambangan dan Penggalian	1 999.46	2 038.99	2 077.89	2 125.93	2 148.63	2,200.50
C	Industri Pengolahan	1 360 346.74	1 448 902.01	1 553 358.78	1 677 594.47	1 795 195.00	1,878,541.20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6 771.40	7 024.10	7 295.23	7 653.35	8 070.47	8,610.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17 920.24	18 381.81	19 084.32	20 389.41	21 294.63	22,256.20
F	Konstruksi	519 974.37	548 471.11	572 823.22	604 746.43	616 993.38	647,196.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 894 878.69	1 979 784.51	2 080 949.44	2 202 184.40	2 368 251.95	2,515,131.30
H	Transportasi dan Pergudangan	227 350.45	242 757.18	260 069.29	281 347.28	305 207.24	332,996.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	380 140.17	407 813.98	437 587.72	470 288.15	513 716.54	559,236.80
J	Informasi dan Komunikasi	1 232 307.53	1 332 551.49	1 421 031.92	1 517 253.95	1 598 216.24	1,671,410.60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	726 152.79	780 748.81	836 281.66	868 720.98	904 191.40	947,538.70
L	Real Estate	203 891.18	217 675.16	229 959.00	239 665.23	248 223.04	263,019.00
M,N	Jasa Perusahaan	56 688.15	61 455.14	65 102.81	69 233.06	72 911.99	77,362.40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	270 881.66	281 384.55	289 960.11	297 094.28	310 417.41	322,375.70
P	Jasa Pendidikan	586 576.48	623 549.41	655 602.35	685 125.97	714 001.11	768,654.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98 574.75	107 794.60	114 103.29	120 873.65	129 792.56	139,551.30
R,S,T,U	Jasa lainnya	306 595.49	319 713.67	333 035.48	346 821.69	366 725.46	392,098.80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7 965 267.82	8 455 436.28	8 954 697.15	9 486 136.63	10 051 710.42	10,623,814.30
PDRB TANPA MIGAS		7 965 267.82	8 455 436.28	8 954 697.15	9 486 136.63	10 051 710.42	10,623,814.30
* Angka Sementara							
** Angka Sangat Sementara							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Tabel I.6. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Kota Madiun

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	98 020.11	102 288.55	100 958.51	105 674.95	106,813.50
B	Pertambangan dan Penggalian	2 477.37	2 616.39	2 727.42	2 906.63	3,049.10
C	Industri Pengolahan	1 637 081.53	1 807 894.99	1 983 440.19	2 143 802.66	2,290,021.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7 775.34	8 393.29	9 520.29	10 346.28	11,222.20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22 645.13	24 461.44	26 744.42	28 512.67	29,039.70
F	Konstruksi	664 080.17	718 117.55	767 940.90	805 272.14	834,712.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 529 951.04	2 791 973.25	3 051 458.79	3 391 827.03	3,658,646.60
H	Transportasi dan Pergudangan	321 165.24	360 088.42	407 727.11	450 471.70	498,887.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464 842.52	523 627.98	574 364.44	646 994.73	705,629.50
J	Informasi dan Komunikasi	1 393 956.63	1 524 590.76	1 660 030.12	1 772 672.65	1,851,667.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 056 626.65	1 177 737.24	1 259 761.03	1 355 512.19	1,432,481.00
L	Real Estate	274 014.58	297 817.29	318 811.67	344 399.62	374,195.00
M,N	Jasa Perusahaan	69 258.48	75 725.32	82 453.56	90 302.30	98,169.60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329 408.87	350 207.42	366 763.03	401 374.14	438,156.30
P	Jasa Pendidikan	802 998.19	862 990.11	923 493.13	988 128.78	1,067,457.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131 102.18	141 938.62	155 983.96	172 624.10	189,687.40
R,S,T,U	Jasa lainnya	386 663.49	413 640.76	439 721.91	479 559.15	518,484.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10 192 067.51	11 184 109.38	12 131 900.47	13 190 381.74	14,108,321.50
PDRB TANPA MIGAS		10 192 067.51	11 184 109.38	12 131 900.47	13 190 381.74	14,108,321.50
* Angka Sementara						
** Angka Sangat Sementara						

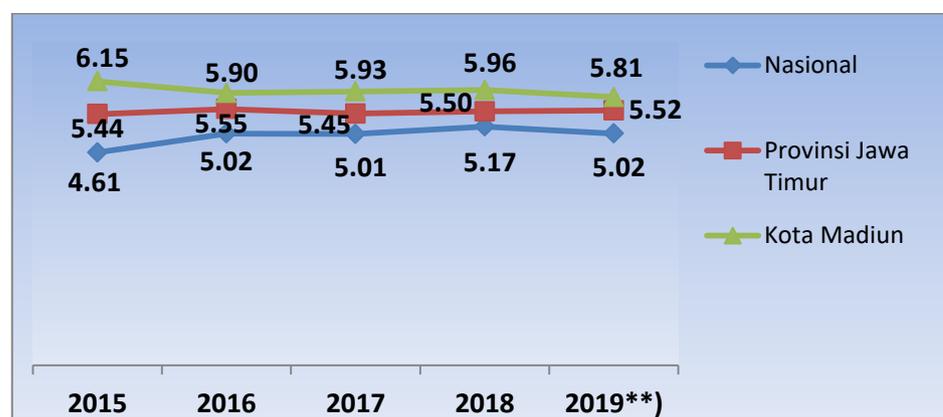
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Seperti terlihat pada tabel I.5 dan tabel I.6. PDRB Kota Madiun menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, baik PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Penghitungan dengan menggunakan tahun dasar tahun 2010, besarnya PDRB Kota Madiun tahun terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2019 sudah mencapai sebesar 10.623.814,30 juta rupiah (ADHK) dan 14.108.321,50 juta rupiah (ADHB).

Potensi ekonomi Kota Madiun yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas, maka upaya mendorong pertumbuhan perekonomiannya mengandalkan pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil, industri pengolahan, dan sektor informasi dan komunikasi. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil, dan sektor informasi dan komunikasi tumbuh paling tinggi dan kontribusinya paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun dan nilai perbandingan absolut antar kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi baik Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Pendapatan perkapita juga terus mengalami kenaikan, serta inflasi yang cenderung menurun dan didukung oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan pemerintahan yang stabil dan kondusif merupakan potensi yang baik bagi perkembangan Kota Madiun.

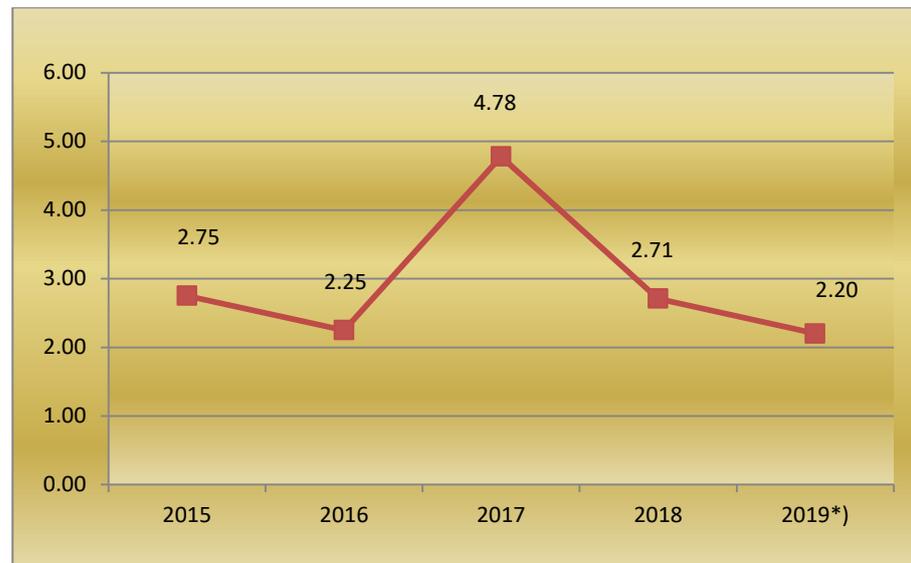
**Gambar I.4. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun
Tahun 2015-2019**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

**): Data sangat sementara

**Gambar I.5. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun
Tahun 2015-2019**

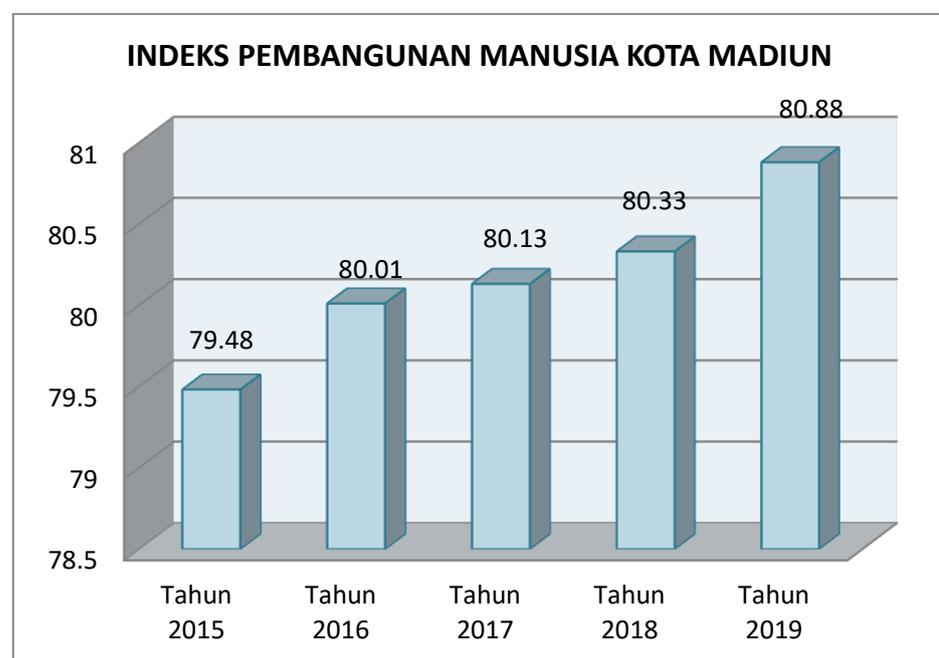


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

*) : Data sementara

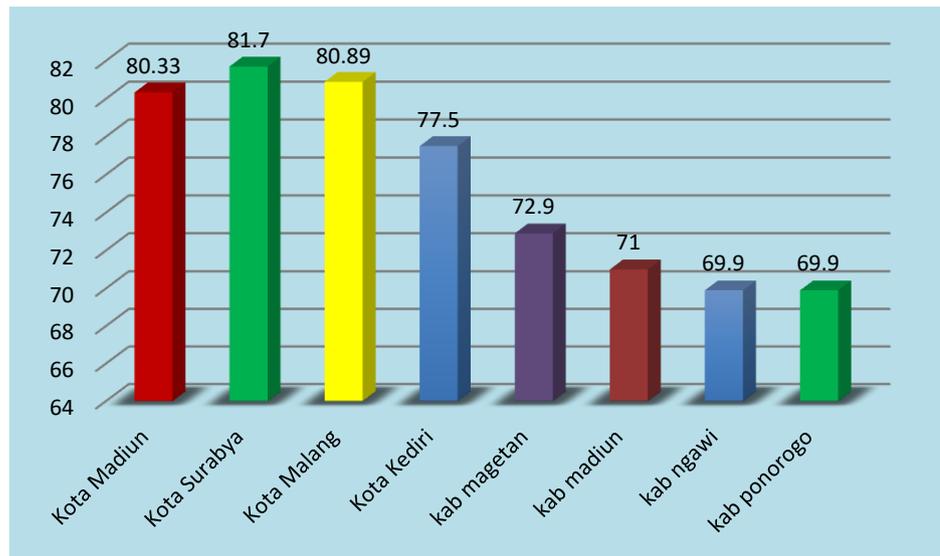
b. Indeks Pembangunan Manusia

Gambar I.6. Perkembangan IPM Kota Madiun 2015-2019



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

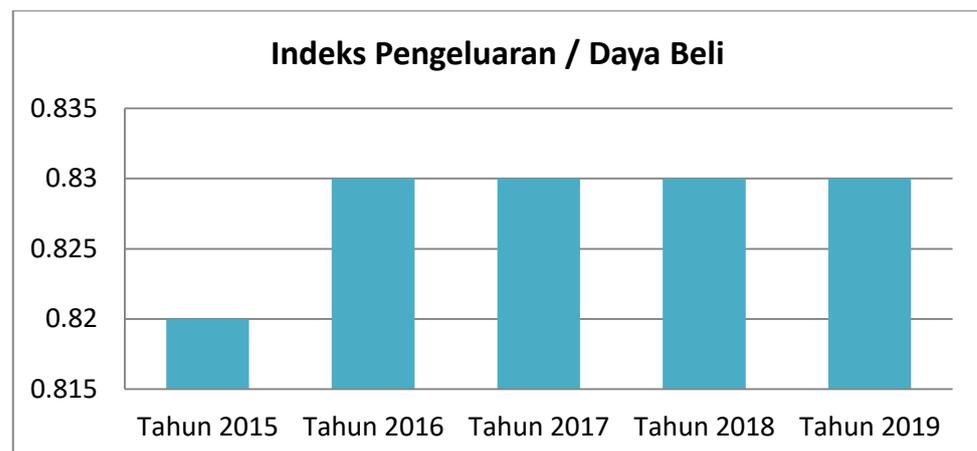
**Gambar I.7. Indeks Pembangunan Manusia
Kota Madiun dibandingkan dengan Daerah sekitar**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

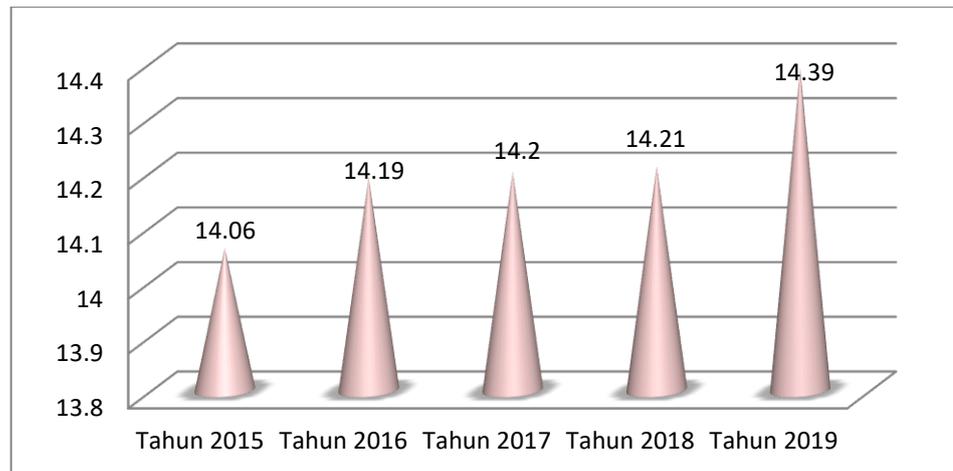
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun sebagaimana tersaji dalam grafik diatas menunjukkan tren yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, IPM Kota Madiun baru mencapai angka 79,48. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2019 IPM Kota Madiun sudah mencapai angka 79,48, masih di atas rata-rata tingkat Provinsi maupun Nasional. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu Indeks Paritas Daya Beli/*Purchase Power Parity* (PPP), Angka Harapan Hidup dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

**Gambar I.8. Indeks Pengeluaran/Daya Beli di Kota Madiun
Tahun 2015-2019**



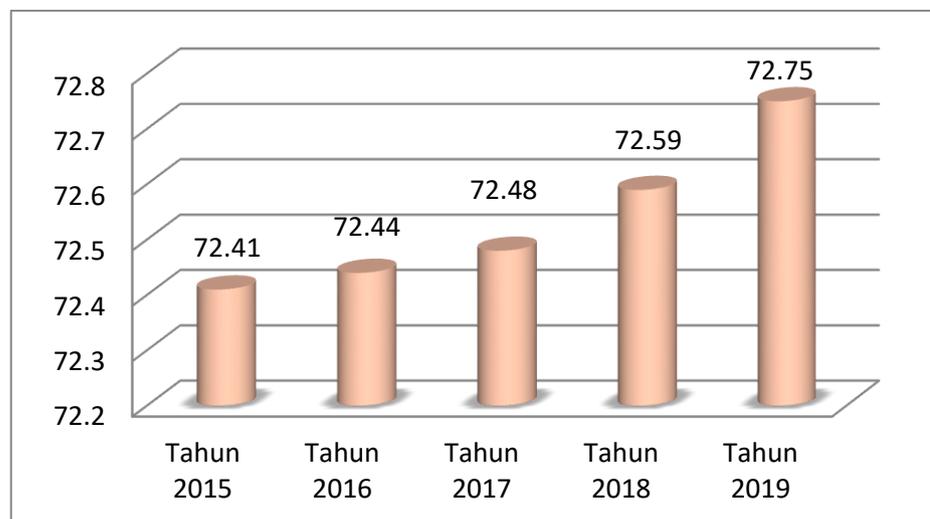
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Gambar I.9. Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

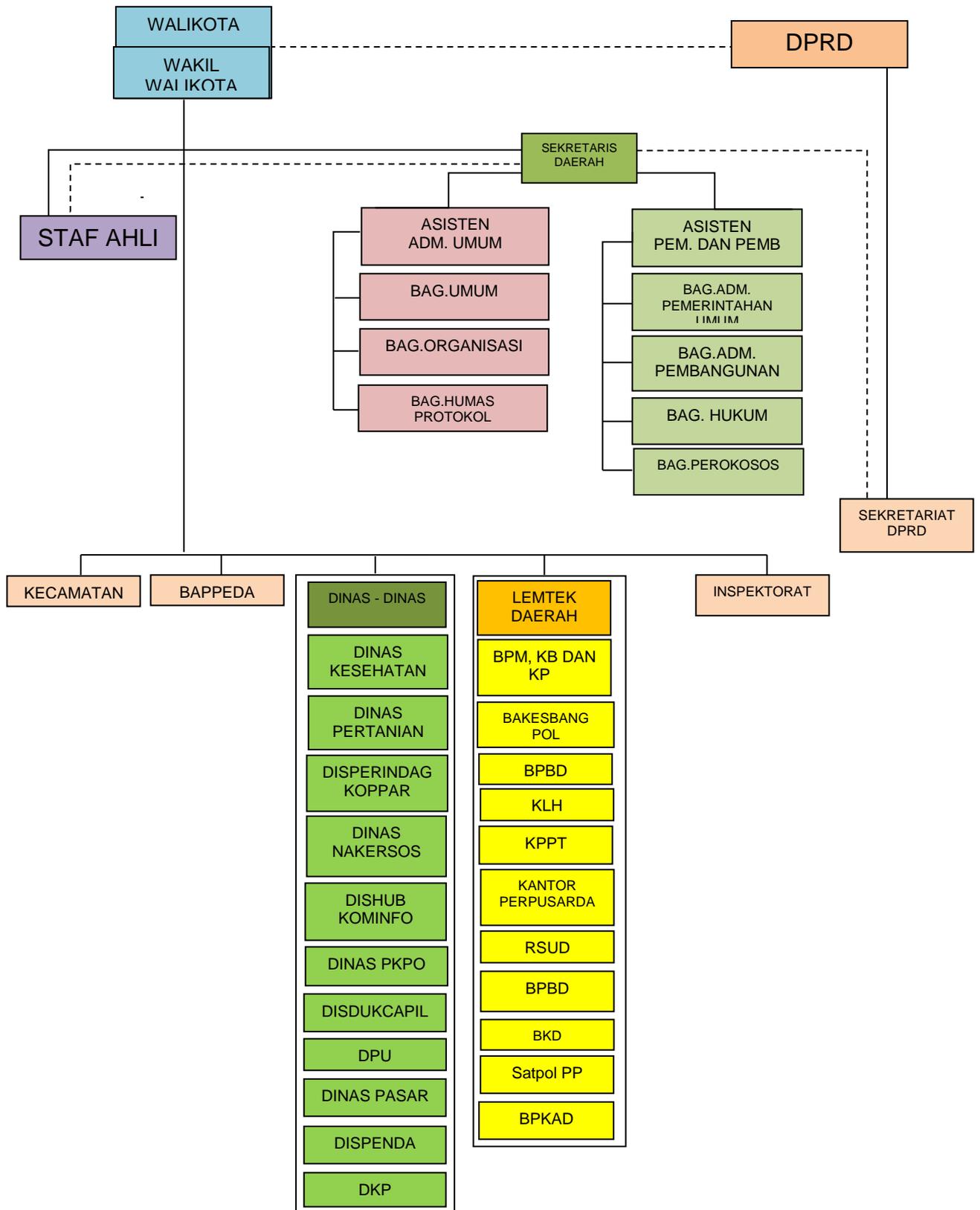
Gambar I.10. Angka Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun



C. Struktur Organisasi



D Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan tata cara merumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penentuan Isu Strategis Dokumen RPJMD memiliki jangka menengah 5 (lima) tahun, maka akan dirumuskan isu strategis yang berpotensi muncul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Pembobotan Setiap isu strategis yang telah ditentukan, akan dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi . Kriteria dalam penentuan isu strategis didasarkan pada 6 kriteria dengan bobot yang berbeda. Kriteria beserta bobotnya tersebut sebagai berikut:
 - 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (bobot: 20 poin)
 - 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (bobot: 10 poin)
 - 3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat (bobot: 20 poin)
 - 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah (bobot: 10 poin)
 - 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot: 15 poin)
 - 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot: 25 poin)

Berdasarkan kriteria beserta bobotnya tersebut, didapatkan hasil pembobotan isu strategis Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel I.7. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun
Tahun 2019-2024**

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria (poin)						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	20	7	20	10	7	10	74
2.	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat	20	10	20	10	15	15	90
3.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	20	10	20	10	10	15	85
4.	Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan	20	10	20	10	15	25	100
5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	20	10	20	10	15	25	100
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota	15	7	20	10	10	20	82
7.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	15	10	15	6	10	20	76
8.	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	20	10	15	10	15	25	95
9.	Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	10	10	15	10	7	15	67
10.	Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif	10	10	15	10	7	15	67
11.	Percepatan Pengembangan Agroindustri	15	7	20	10	10	20	82

Sumber Data : BAPPEDA Kota Madiun

Isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kota Madiun sesuai dengan urutan pembobotannya yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
3. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
4. Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Percepatan Pengembangan Agroindustri;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota;
8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif;
11. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.



F. Sistematika

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2016 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Struktur Organisasi, isu strategis, serta inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 meliputi RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2019, sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun tahun 2019 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

LAMPIRAN - LAMPIRAN





1. Nama : Sri Wahyuni (FB Uun Wahyu)
2. Alamat : Jl. Puspowarno Nomor 17 RT. 10 RW. 4
Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun 63124 Telepon :
085235240881
3. Sol : Wedges tinggi 3 cm kaki standar sz 39

1. Nama : Sri Wahyuni (FB Uun Wahyu)
2. Alamat : Jl. Puspowarno Nomor 17 RT. 10 RW. 4
Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun 63124 Telepon :
085235240881
3. Sol : high heels tinggi 2 cm kaki kurus sz 37

Kepada : Bu UCCE
Jalan Alamanda Nomor 3
(Masuk dari Jalan Tulip), Kompleks
Paspampres, Kotabaru Bogor 11610
Telepon : 081218549026

Pengirim : Sri Wahyuni (FB Uun Wahyu)
Jl. Puspowarno Nomor 17 RT. 10 RW. 4
Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo
Kota Madiun 63124 Telepon : 085235240881



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun tahun 2014-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Madiun, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Walikota sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Madiun memuat gambaran umum kondisi kota madiun, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014–2019 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 disusun dengan strategi ***keberlanjutan*** yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang berkewajiban meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Visi

Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat untuk lebih dikembangkan, maka ditetapkan visi Kota Madiun dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 dan selanjutnya berdasarkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditetapkan visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Visi RPJPD dan RPJMD

PERIODE	VISI
RPJPD 2005-2025	Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera
RPJMD 2014-2019	Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera
Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD	Terwujudnya Masyarakat yang Lebih Maju dan Sejahtera Melalui Optimalisasi Peran Kota Madiun Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna "Kemajuan" berkaitan dengan kondisi yang terus-menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *goodgovernance*.



Makna “Sejahtera” berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2014-2019 sebagai berikut :

Tabel II.2 Visi dan Misi RPJMD

VISI : "Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera"	
M I S I	1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
	4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.

3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan Pembangunan Berbasis pada Partisipasi Masyarakat	Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan Masyarakat

4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD

Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Akhir RPJMD 2019
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD		81%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender(IPG)		93,89

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik				
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Akhir RPJMD 2019
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		Sangat tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah		BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat		79,5



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	TargetAkhir RPJMD 2019
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
		Tingkat keterbukaan informasi publik	A

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	TargetAkhir RPJMD 2019
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,59 tahun
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	93%
		Rasio Rumah layak Huni	99,42%
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1,50%
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,51
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	TargetAkhir RPJMD 2019
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	3,14%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	23,86%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	17,2%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,29%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2019
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%

B. Perjanjian Kinerja

RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Madiun tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3.1
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (BAIK)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (BAIK)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)



1	3	4	5
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang Mendapatkan Klasifikasi Swasembada	14,81% (4 Kelurahan)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83.25
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	80.73
		Indeks Sarana Prasarana Permukiman	86.62
		Indeks Infrastruktur	96
		Kinerja Ruas Jalan	0.44%
5	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.04
		Persentase Ruang yang dimanfaatkan RT RW	100
6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80.51
		Indeks Kesehatan	0.81
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0.77
8	Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Laju Pertumbuhan PDRB	6.01
		PDRB Perkapital	76.53
		Angka Kemiskinan	4.47
		ICOR	2.55
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.8



1	3	4	5
9	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5.91
		Pertumbuhan Sektor Pengolahan	7.3
		Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8.7
10	Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1.03
		Indeks Gini	0.35
11	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan	2,77 (TINGGI)
		Prestasi Pemuda dan Olah Raga di Tingkat Regional dan Nasional	33

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82,833,039,777.00
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	17,261,659,400.00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19,346,185,146.00
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2,087,120,380.00
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	453,298,640.00
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,945,668,000.00
7	Program Pendidikan Dasar	128,465,915,190.00
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,676,898,450.00
9	Program Pendidikan Non Formal	1,335,404,250.00
10	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	31,405,395,000.00
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7,689,183,000.00
12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,973,830,000.00
13	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	28,695,852,000.00
14	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4,400,312,000.00
15	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	3,941,300,000.00
16	Program Peningkatan Kinerja BLUD	78,227,412,000.00



1	2	3
17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	6,683,653,550.00
18	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	39,634,550,000.00
19	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	77,891,388,000.00
20	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	27,400,000,000.00
21	Program Pengendalian Banjir	35,150,000,000.00
22	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1,400,000,000.00
23	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	3,201,308,000.00
24	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	23,712,407,500.00
25	Program Pelayanan Pertanahan	116,650,000.00
26	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	335,000,000.00
27	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1,992,757,000.00
28	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	865,020,000.00
29	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1,180,670,000.00
30	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,587,555,000.00
31	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	5,827,197,534.00
32	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	5,213,231,472.00
33	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	1,708,991,692.00
34	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	1,688,776,160.00



1	2	3
35	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan KetenagaKerjaan	1,993,192,500.00
36	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	199,999,500.00
37	Program Ketrasmigrasian	32,694,480.00
38	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	1,244,600,000.00
39	Program Pembinaan Industri	100,000,000.00
40	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	842,143,000.00
41	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	856,500,000.00
42	Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1,417,328,000.00
43	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7,885,000,000.00
44	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	349,538,520.00
45	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	1,647,273,440.00
46	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	510,942,600.00
47	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	5,771,991,480.00
48	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3,129,892,064.00
49	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	400,000,000.00
50	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	9,402,650,000.00
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9,182,000,000.00
52	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	570,000,000.00
53	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	1,599,000,000.00
54	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	670,591,000.00
55	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	508,400,000.00
56	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1,194,010,000.00
57	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	1,010,000,000.00



1	2	3
58	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	5,165,000,000.00
59	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	5,580,000,000.00
60	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	1,798,254,000.00
61	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1,285,000,000.00
62	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	610,000,000.00
63	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1,757,003,000.00
64	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	445,000,000.00
65	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	927,550,000.00
66	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	799,058,000.00
67	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3,258,854,380.00
68	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,228,496,980.00
69	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	4,129,164,000.00
70	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	460,000,000.00
71	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100,000,000.00
72	Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	864,596,560.00
73	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	140,903,000.00
74	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	20,258,589,060.00
75	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	330,063,400.00
76	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	132,640,000.00
77	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,040,883,300.00
78	Program Penataan Aparatur	331,317,600.00
79	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	5,404,168,000.00
80	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,194,229,000.00



1	2	3
81	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	967,592,000.00
82	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	250,000,000.00
83	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	5,244,980,000.00
84	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	453,375,000.00
85	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	981,120,000.00
86	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2,177,940,000.00
87	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	584,678,000.00
88	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	22,650,000.00
89	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,459,083,000.00
90	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	297,056,200.00
91	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	541,961,920.00
92	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	668,249,820.00
93	Program Penyelenggaraan Kelurahan	15,009,182,100.00
94	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	515,996,016.00
95	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	698,942,446.00
96	Program Dana Kelurahan	9,494,469,000.00
97	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	740,031,891.00
98	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	1,142,817,070.00
99	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	344,825,000.00
100	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,298,000,000.00
101	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2,338,651,000.00



1	2	3
102	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	859,000,000.00
103	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	813,000,000.00
104	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	1,435,000,000.00
105	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	6,341,941,160.00
106	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	50,000,000.00
	JUMLAH	815,816,687,628.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100 \%$	Sangat Baik
2	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3	$60 \% \leq X < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X < 60 \%$	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- (1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- (2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel III.2 Pengukuran Realisasi Kinerja 2019

Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan berbasis pada Partisipasi Masyarakat					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	81,13%	100,16%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89	94,05	100,27%



Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	88,45	111,26%
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%
		Tingkat keterbukaan informasi publik	A	A	100%

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
3.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,77	101,30%
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,59 tahun	72,75 tahun	100,20%
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	93%	93,64%	100,69%
		Rasio Rumah layak Huni	99,42%	99,95%	100,53%
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1,50%	1,64%	109,33%
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,51	63,80	93,13%
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	100%	100%



Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	3,14%	0,63%	20%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	4,01	121,06%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	23,86%	25,93%	108,68%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	17,2%	17,83%	103,67%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,29%	8,95%	142,36%
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%	100%	102,04%
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%	100%	100%

3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :



1. Misi Pertama : Mewujudkan Pembangunan berbasis pada Partisipasi Masyarakat

Tujuan Pertama : Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi		
			2018 (n-1)	2019 (n)	
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	79,63%	81,13%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89	93,66	94,05

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD	
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	81,13%	100,16%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89	94,05	100,27%

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	-	-
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,05	90.91	91,07

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

1. Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan diukur menggunakan indikator persentase masyarakat yang diakomodir dalam RKPD dapat dihitung dengan membandingkan jumlah jenis usulan yang masuk RKPD dibagi jumlah jenis usulan masyarakat dikali 100%.

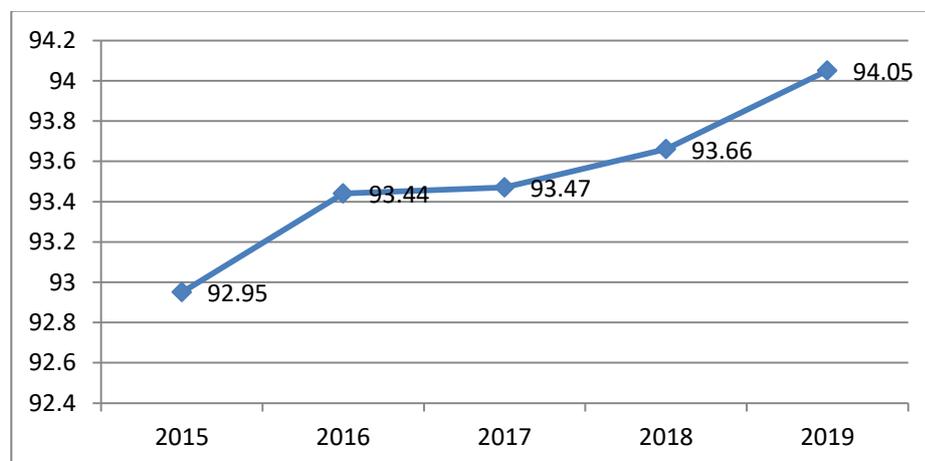
Pada Tahun 2016 jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 38 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebesar 76,32%, sedangkan di tahun berikutnya jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jenis usulan masyarakat sebanyak 55 jenis usulan sehingga didapatkan realisasi 78,18%. Tahun 2018 jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 54 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebesar 79,63%. Dan di tahun 2019 terdapat peningkatan yaitu jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 53 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebesar 81,13% dengan capaian sebesar 100,16%.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin baik kesetaraan gender suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,95 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 93,44, di tahun 2017 sebesar 93,66, sedangkan 2018 sebesar 93,47. Untuk tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 94,05 lebih tinggi dari IPG Provinsi Jawa Timur 90,91 maupun IPG Nasional 91,07. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

Gambar III.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun tahun 2015-2019





Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mencapai IPG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan

- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

2. Misi Kedua : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Tujuan Pertama : *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2018 (n-1)	2019 (n)
2.1.1 Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	B	B
	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	82,85	88,45
2.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	B	A	A

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi, BPKAD, Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
2.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	88,45	111,26%
2.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	B	A	100%

Sumber Data : *Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi, BPKAD, Dinas Kominfo*

Tabel III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
2.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	N/A



		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B	A	N/A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,45	81,33	N/A
2.1.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	N/A
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	A	A	N/A

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi, BPKAD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Pada Misi 2 Tujuan 1 dan Sasaran 1 terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu :

1. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, Pemerintah Kota Madiun meraih nilai 3,3056 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Sedangkan berturut-turut untuk Tahun 2015 : 3,3702, Tahun 2016 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya partnership yang sangat baik antar stakeholder antara pemerintah eksekutif dengan legislatif dan juga partisipasi dari masyarakat.

Tabel III.9. Tabel Nilai EKPPD tahun 2015-2019

No	Tahun	Peringkat	Skor	Status
1	2015	1	3,3702	Sangat Tinggi
2	2016	5	3,2055	Sangat Tinggi
3	2017	N/A	-	-
4	2018	25	3,2399	Sangat Tinggi
5	2019	7	3,3056	Sangat Tinggi

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
	A	>80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
	B	>60 -70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja



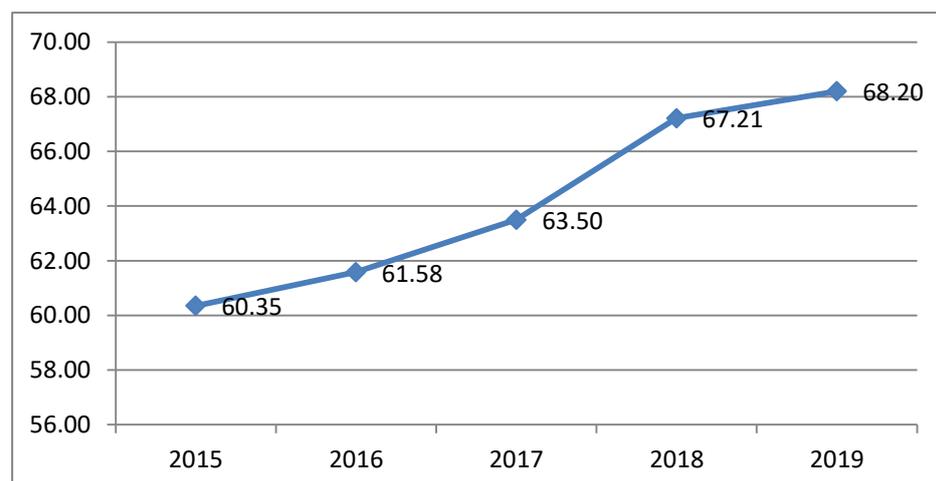
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
	CC	>50 -60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
	C	>50 -60	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
	D	>50 -60	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/657/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 68,20. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 capaian kerjanya mengalami kenaikan namun secara kategori nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun masih tetap bernilai B.

Gambar III.2 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun tahun 2015-2019



Sumber Data : Kementerian PAN dan RB

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penetapan RPJMD dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah
2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja



3. Melakukan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi, untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah
4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2019-2020
5. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran
6. Saat ini sedang dilakukan restrukturisasi e sakip yang diintegrasikan dengan e planning dan si monev bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika , karena waktu perpindahan server dari pihak ketiga ke Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa item yang error.
7. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaporkan Tahun 2020, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/ Biro Organisasi, dan study banding

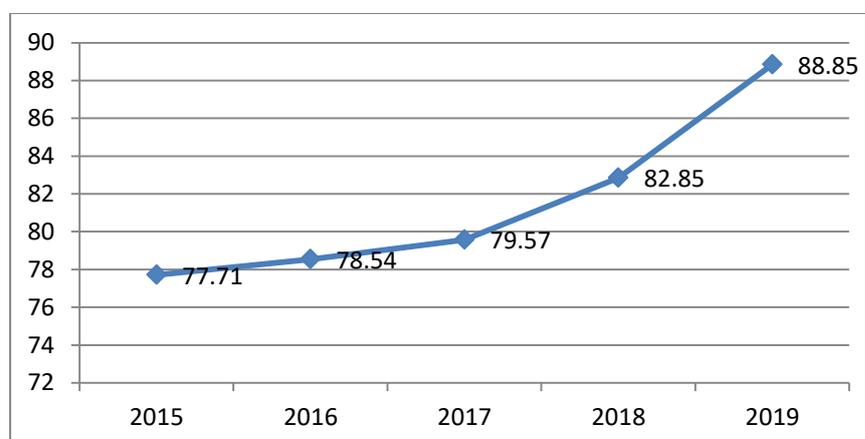
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan

publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2019, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 88,45 yaitu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dengan indeks 82,85. Kenaikannya sebesar 5,6 yaitu lebih besar dari kenaikan sebelumnya sebesar 3,28. Nilai tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 81, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 111,26%. Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Gambar III.3 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun tahun 2015-2019



Sumber Data : *Bagian Organisasi Setda Kota Madiun*



Trend Indeks Kepuasan Masyarakat mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Madiun melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi terhadap penyusunan Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Melakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melakukan kerjasama dengan BSN dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antar Pemerintah Kota Madiun dengan Badan Standarisasi Nasional Nomor $\frac{80/6/401.011/2019}{02/BSN/MoU/IV/2019}$ tentang Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2019 baru dilaksanakan pada 1 Unit Pelayanan Publik)

Pada Misi 2 Tujuan 1 dan Sasaran 2 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara periodik terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2016/2017 yang mencakup pemeriksaan terhadap 1. Laporan Realisasi Anggaran,

2. Laporan perubahan saldo akhir kas, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan perubahan ekuitas, 6. Laporan Arus Kas, dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2019. Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Adapun opini BPK mulai tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.9. Hasil Capaian Opini BPK Kota Madiun Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Opini	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Madiun

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mempertahankan Opini BPK yaitu :

1. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan
2. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan pelaporan keuangan dan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan asset daerah dengan melaksanakan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan peningkatan monitoring dan evaluasi
3. Penguatan perencanaan dan penganggaran
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
5. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan secara berkala tentang tata kelola keuangan dan pelaporan keuangan
6. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa
7. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah



8. Meningkatkan ketersediaan peraturan, kebijakan, system operasional prosedur, mekanisme, petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran maupun pengawasan terhadap penggunaan anggaran
9. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan
10. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Tingkat keterbukaan informasi publik merupakan indikator yang digunakan untuk menjalankan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap beberapa indikator yang antara lain meliputi : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Hasil penilaian tingkat keterbukaan informasi publik Kota Madiun tahun 2019 menunjukkan nilai A yaitu 96,2. Nilai tersebut telah berhasil melampaui target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu nilai B dengan nilai range 80-96 (menuju informatif).

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka mencapai tingkat keterbukaan informasi publik adalah :

1. Melakukan pengintegrasian sistem e-government;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;

6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
7. Mengoptimalkan PPID;
8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat;

3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat

Tujuan Pertama : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Tabel III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2018 (n-1)	2019 (n)
3.1.1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,76	0,77

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
3.1.1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,77	101,31%

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel III.12. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
3.1.1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,77	0,62	-

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Angka Rata-rata lama Sekolah.

1. Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas

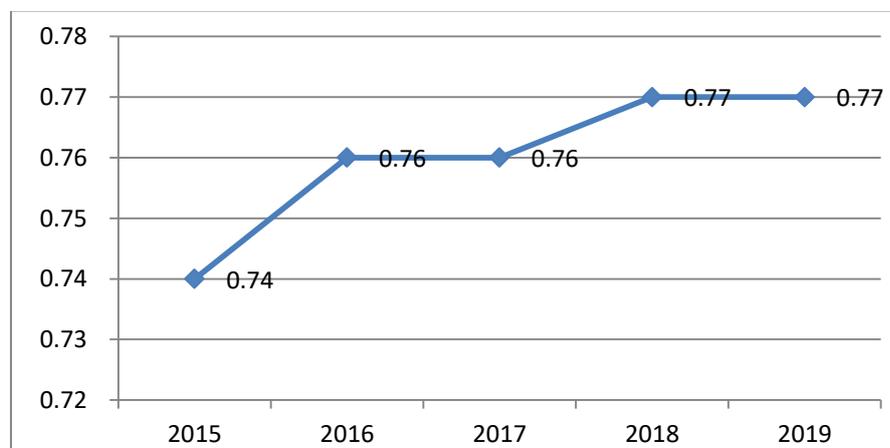
Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, pada tahun 2019 angka melek huruf di Kota Madiun sudah mencapai 100%

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 adalah 11,11. Sedangkan data sementara dari BPS Kota Madiun tahun 2019 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 11,13. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,13 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.

Indeks Pendidikan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 Indeks Pendidikan Kota Madiun baru mencapai angka 0,74. Angka tersebut terus meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2016 dan 2017, serta meningkat lagi menjadi 0,77 pada tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2019 Indeks Pendidikan di Kota Madiun lebih tinggi daripada Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Trend kenaikan Indeks Pendidikan sebagaimana tersaji pada grafik sebagai berikut :

Gambar III.4 Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Madiun tahun 2015-2019



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Upaya dalam rangka meningkatkan indeks pendidikan di Kota Madiun dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program manajemen pelayanan pendidikan
2. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program pendidikan dasar
4. Program pendidikan anak usia dini
5. Program pendidikan non formal

Penghargaan yang diterima Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Juara I Nasional Lomba UKS (TK Negeri Pembina)
- b. Juara I Nasional Kepala Sekolah Berinovasi dalam penjaminan mutu sekolah rujukan (Dra. Sri Mugi Lestari, M.Si Ka. SDN 02 Mojorejo)

- c. Juara I Nasional PAUD Aku Anak Indonesia Gemar Makan Ikan (KB Joy)
- d. Juara II Nasional SDN 02 Mojorejo Lomba Budaya Mutu
- d. Juara II Nasional Lomba FLSSN kategori menyanyi solo (Bernaditta Salwa)
- e. Juara I Propinsi Jawa Timur Lomba POCIL SDN 03 Madiun Lor.
- f. Juara I Propinsi Lomba Pelopor Keselamatan Lalu Lintas SMPN
- g. Juara I Propinsi Lomba Pengawas Sekolah Berprestasi (Sri Mulyani, S.Pd)
- h. Juara II Propinsi Jawa Timur Kepala Sekolah Berprestasi (Sri Istiana S.Pd PAUD Ka. TK Kartika IX/3)
- i. Juara III Propinsi Jawa Timur Guru Berprestasi TK Kartika IX/3 (Supini, S.Pd PAUD)

Tujuan Kedua : *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*

Tabel III.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
					2018 (n-1)	2019 (n)
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan	Hidup	72,59 tahun	72,59 tahun	72,75 tahun

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan	Hidup	72,59 tahun	72,75 tahun	100,22%

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

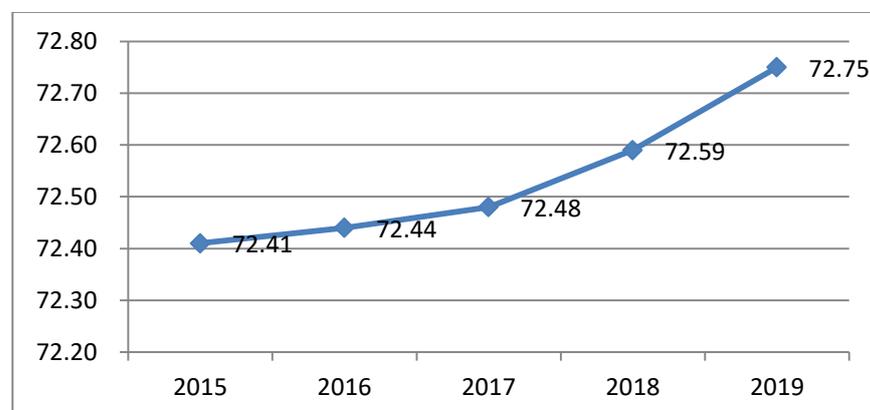
Tabel III.15. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup		72,75 tahun	71,18 tahun	71,20 tahun

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat diukur dengan indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Data Angka Harapan Hidup (AHH) perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun 2019 yaitu sebesar 72,75 Tahun, diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,59 Tahun. Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun trend Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Madiun pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar III.5 Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun tahun 2015-2019

Sumber Data : *Badan Pusat Statistik*

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2016 ke Tahun 2019 mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
- c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit

Tujuan Ketiga : *Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan*

Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2018 (n-1)	2019 (n)
3.3.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	93%	94,51%	93,64%
	Rasio rumah layak huni	99,42%	99,65%	99,95%
	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,50%	1,61%	1,64%



3.3.2	Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,87	64,22	63,87
		Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
3.3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	93%	93,64%	100,68%
		Rasio rumah layak huni	99,42%	99,95%	100,53%
		Persentase penurunan angka kecelakaan	1,50%	1,64%	100,69%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
3.3.2	Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,87	63,87	93,23%
		Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

Tabel III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
3.3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	93,64%	-	-
		Rasio rumah layak huni	99,95%	-	-
		Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	-	-
3.3.2	Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,87	65,09	-
		Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW	100%	-	-

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

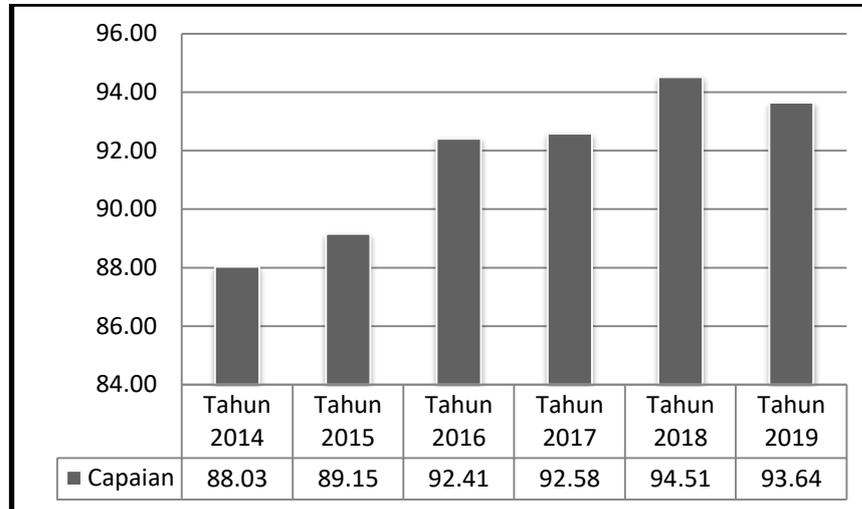
Tujuan 3 Misi 3 dan Sasaran 1 terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu :

1. Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 93,64 % atau panjang jalan kota dalam kondisi baik yaitu 405,540 km dibagi dengan total panjang jalan kota sepanjang 433,095 km dikali 100%, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terealisasi 94,51 % atau panjang jalan kota dalam kondisi baik yaitu 397,480 Km dibagi total panjang jalan kota sepanjang 433,095 km dikali 100%, sehingga ada peningkatan jalan dalam 8,060 Km, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengaspalan jalan/overlay dan peningkatan kapasitas jalan (pelebaran).

Perbandingan capaian kinerja indikator Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar III.6. Capaian kinerja Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Adapun perkembangan kondisi jalan di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel III.20 Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Madiun dalam Km

Uraian	2018	2019
Kondisi Baik	397,480	405,540
Kondisi Sedang	31,520	26,250
Rusak Ringan	1,470	-
Rusak (Tanah)	2,625	1,305
Panjang Jalan Total	433,095	433,095

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2019 terealisasi lebih besar dari target, hal ini dikarenakan banyaknya pemeliharaan ruas jalan yang ada di Kota Madiun. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang mantap dan memadai telah dilakukan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun yaitu :

- 1) Kondisi jalan yang baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin

- 2) Kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala
- 3) Kondisi jalan rusak dilaksanakan sistim pemeliharaan berkala atau peningkatan jalan
- 4) Dukungan anggaran yang disediakan

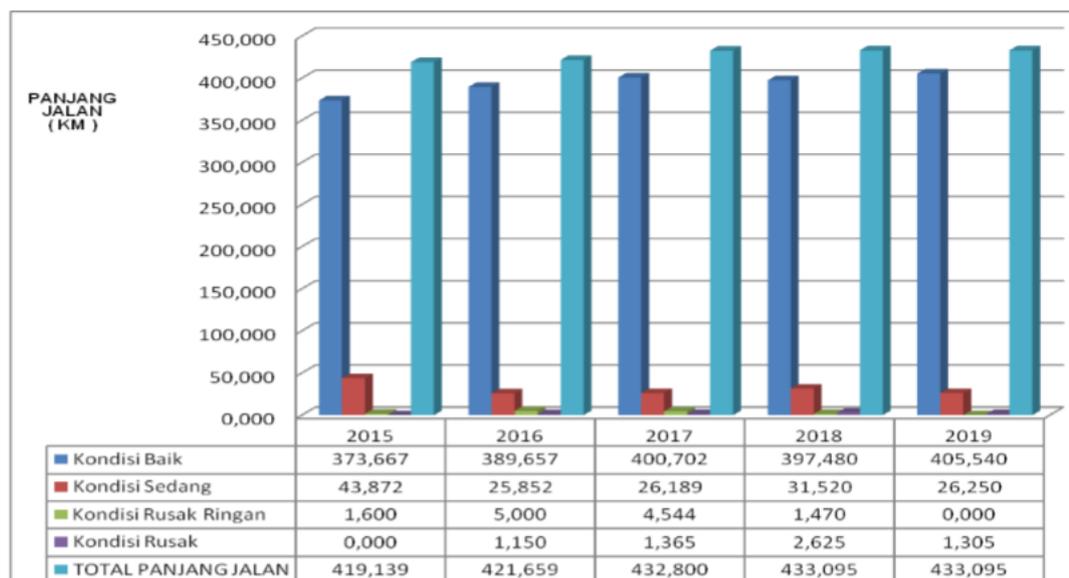
Faktor pendorong tercapainya keberhasilan tersebut dikarenakan adanya kegiatan peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan berkala jalan paket 1 sebanyak 12 ruas
- 2) Pemeliharaan berkala jalan paket 2 sebanyak 17 ruas
- 3) Pemeliharaan berkala jalan paket 3 sebanyak 10 ruas
- 4) Pemeliharaan berkala jalan paket 4 sebanyak 14 ruas
- 5) Peningkatan jalan sepanjang 12,7 Km

Panjang jalan Kota pada tahun 2019 adalah 405,540 km atau 93,64 % dalam kondisi baik, 6,06 % dalam kondisi sedang, dan sisanya sebesar 0,30 % dalam keadaan rusak ringan.

Untuk informasi lebih rinci kondisi jalan di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar III.7 Grafik Kondisi Jalan di Kota Madiun



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel III.21 Kondisi Jalan Di Kota Madiun

NO	TYPE PERKERASAN	KONDISI	JALAN		
			PANJANG RUAS KONDISI JALAN (KM)	PANJANG TYPE JALAN TOTAL (KM)	
Jalan Nasional di Kota Madiun					
1	ASPAL	a	Baik	4,295	4,295
		b	Sedang	12,245	12,245
		c	Rusak Ringan	-	-
		d	Rusak Berat	-	-
TOTAL					16,540
Jalan Propinsi di Kota Madiun					
2	ASPAL	a	Baik	-	
		b	Sedang	-	
		c	Rusak Ringan	-	
		d	Rusak Berat	-	
TOTAL					
Jalan Kota di Kota Madiun					
3	ASPAL	a	Baik	405,540	433,095
		b	Sedang	26,250	
		c	Rusak Ringan	-	
		d	Rusak Berat	1,305	
TOTAL					449,635

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dengan selesainya Kegiatan Pemeliharaan Jalan, maka kegiatan penyelenggaraan jalan sekarang menjadi berubah penekanannya, jalan yang selesai dibangun ataupun setelah dilaksanakan pemeliharaan berkala pada tahun sebelumnya akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur sehingga dari jalan kondisi baik menjadi kondisi sedang, kondisi sedang menjadi kondisi rusak ringan dan seterusnya.

Sedangkan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada tahun 2019 dilaksanakan pekerjaan penambalan jalan berlubang, pendedukan saluran, pengeprasan bahu jalan, pembersihan trotoar, perbersihan semak disekitar jembatan, pemasangan trotoar keramik pada jembatan, pengecatan leuneng dan kanstin, pembersihan gorong-gorong dengan tujuan untuk mempertahankan kondisi konstruksi dan kelengkapan jalan dan jembatan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan dan kenyamanan lalu lintas pengguna jalan terjamin dan pelayanan kinerja jalan meningkat.



Hal ini dalam rangka :

- a. Memperkecil biaya operasi kendaraan yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan, geometrik dan kondisi jalan.
- b. Mencegah kerusakan atau mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur rencana.

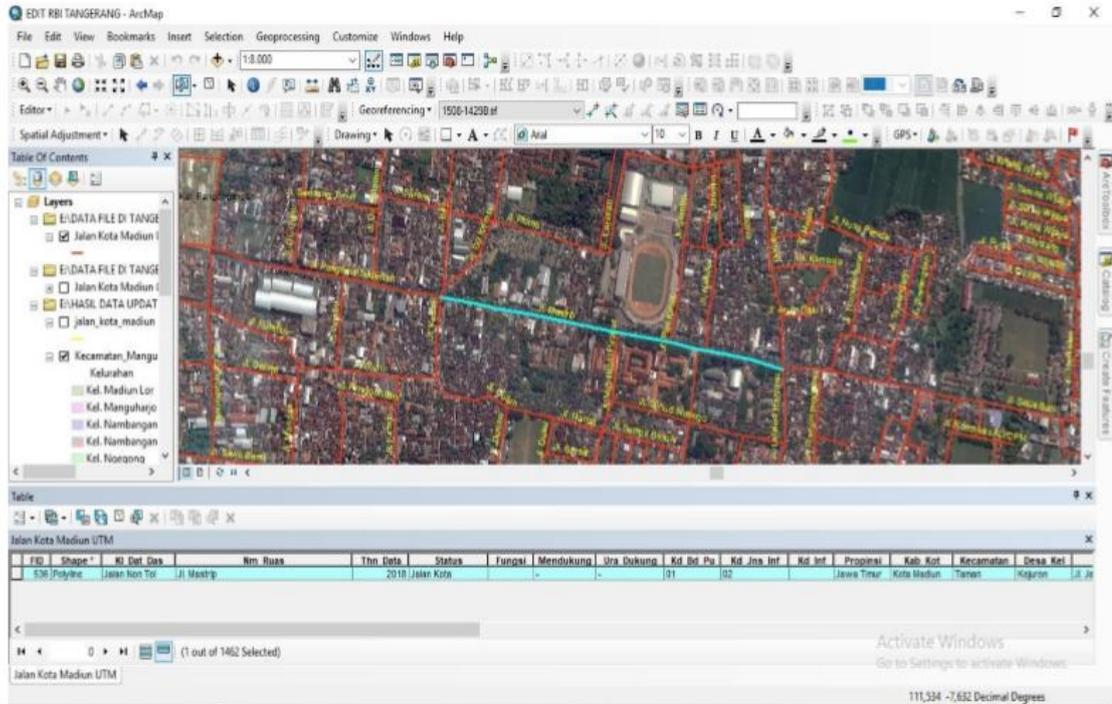
Dampak positif kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Madiun :

- a. Kelancaran lalu lintas Manfaat langsung dari pemeliharaan jalan baik perkerasan jalan maupun pada bangunan pelengkap jalan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya di wilayah Kota Madiun. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.
- b. Merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian Manfaat langsung ini terlihat ketika diadakannya kegiatan trotoarisasi yang bebasiskan lantai keramik dengan ditandai tumbuhnya aktivitas perekonomian berupa aktivitas PKL di sekitar trotoar yang selesai dibangun.
- c. Pertumbuhan PDRB daerah Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Kota Madiun

Pada tahun 2019 persentase tersedianya informasi data base jalan sudah terealisasi 100%, dikarenakan seluruh data jalan yang ada di Kota Madiun sudah tercover dalam GIS (Geographic Information System) sehingga tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berikut ini contoh tampilan aplikasi GIS (Geographic Information System) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun :

Gambar III.8 Geographic Information System



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Rasio rumah layak huni

Salah satu indikator dalam peningkatan permukiman yang sehat adalah rumah yang layak huni. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat didefinisikan untuk menuju permukiman yang sehat dilakukan upaya untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga

baru mulai tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi didapatkan sebanyak 278 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH.

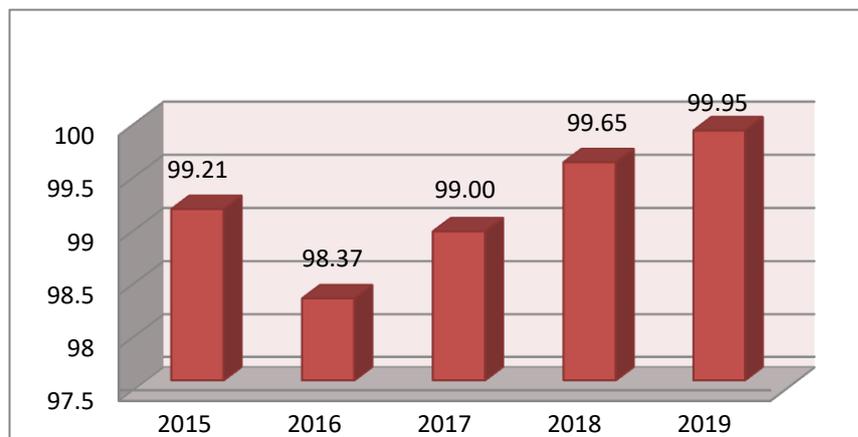
Adapun dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 152 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH serta tahun 2019 setelah diverifikasi didapatkan 132 unit rumah yang menerima bantuan RTLH sehingga masih tersisa sebanyak 20 unit yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut. Bantuan tersebut sudah diberikan pada awal bulan Oktober 2019.

Adapun perhitungan Rasio Rumah Layak Huni sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99,95\%$$

Pelaksanaan Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni tahun 2015 s/d 2019 sebagaimana pada grafik dibawah ini :

Gambar III.9. Rasio Rumah Layak Huni Di Kota Madiun



Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja indikator Rasio Rumah layak Huni di Kota Madiun dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pembuatan data/kajian perumahan, pertanahan dan permukiman
- 2) Penyediaan rumah
- 3) Pemeliharaan dan perbaikan perumahan
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana permukiman

3. Persentase penurunan angka kecelakaan

Indikator kinerja persentase penurunan angka kecelakaan mengalami peningkatan dari target 1.50% menjadi 1.64% yang berarti capaian kinerjanya adalah 109%. Dalam peningkatan kinerja dibanding dari realisasi tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari 1.61 % menjadi 1.64%. Persentase ini didapat dari data kecelakaan yaitu berturut-turut dari tahun 2018 dan 2019 yaitu 244 dan 240 kejadian kecelakaan dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{Jml \text{ Laka Th. } 2018 - Jml \text{ Laka Th. } 2019}{Jml \text{ Laka Th. } 2018} \\ \% &= \frac{244 - 240}{244} \\ &= 1,64 \% \end{aligned}$$

Hal tersebut didukung oleh langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan.
- 2) Memfasilitasi kelancaran angkutan orang dan barang dengan menyediakan prasarana.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar aparat, antar instansi maupun antar wilayah guna meningkatkan sinergisitas dan kelancaran dalam menjalankan tugas.

Tabel III.22. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Di Kota Madiun

No	Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Persentase penurunan angka kecelakaan	0,05%	1,56%	1,59%	1,6%	1,64%

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Kegiatan-Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan indikator tahun 2019 :

1. Kegiatan Angkutan Sekolah Gratis

Kegiatan angkutan sekolah gratis di Kota Madiun pada tahun 2019 dilayani oleh 20 Angkutan Kota dan 3 Bus Sedang. Untuk angkutan kota terbagi menjadi 10 taryek yang melayani rute angkutan sekolah gratis.

Gambar III.10. Angkutan Sekolah Gratis Di Kota Madiun

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas

Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas diantaranya Pemasangan Warning Light, Paku Jalan, Delineator, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Guardrail.

Gambar III.11. Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Di Kota Madiun



Prestasi penghargaan yang diraih oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun pada tahun 2019 yaitu Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan RI.





Tujuan 3 Misi 3 dan Sasaran 2 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

IKLH Kota Madiun tahun 2019 dengan target yang tidak tercapai dan mengalami penurunan bila dibandingkan IKLH tahun 2018, maka secara otomatis target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga dan tidak tercapai. Bila dibandingkan dengan target dan capaian IKLH Provinsi Jawa Timur untuk Kota Madiun masih berada dibawahnya.

Penurunan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Kondisi di Kota Madiun tahun 2019 nilai IKA dan IKU mengalami penurunan sedangkan IKTL mengalami kenaikan.

- a. Penurunan IKA Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2019 sebesar 76,70 menurun dibandingkan IKA tahun 2018 sebesar 76,89. Dari data hasil uji laboratorium air sungai selama setahun menunjukkan bahwa beberapa parameter melebihi baku mutu. Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh terjadinya kemarau panjang sehingga konsentrasi polutan dalam air sungai tinggi yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai yang dipantau. Selain itu angka parameter total coliform sangat tinggi di atas baku mutu, total coliform merupakan indikasi adanya limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan dalam



aliran air sungai. Dimana di Kota Madiun belum ada IPLT untuk menampung limbah tinja, sehingga dimungkinkan limbah tinja dibuang ke sungai yang akan mencemari air sungai.

- b. Penurunan IKU Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 sebesar 84,38 masih berada pada kategori relatif baik meskipun menurun dibandingkan IKU tahun 2018 sebesar 85,50. Namun, secara umum menurunnya curah hujan akibat musim kemarau merupakan penyebab utama penurunan kualitas udara di Kota Madiun. Kemarau panjang menyebabkan tidak ada hujan yang bisa mengurangi pengendapan (pencucian) polutan di udara oleh proses yang dinamakan rain washing. Dengan kondisi udara yang stagnan, cuaca cerah, lapisan inversi suhu atau kecepatan angin yang rendah itulah memungkinkan polusi udara tetap berada di udara sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi. Selain itu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Wilayah Kota Madiun juga berpotensi meningkatkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang dapat mencemari kualitas udara.
- c. Peningkatan IKTL Hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 sebesar 38,87 meningkat dibanding tahun 2018 yaitu 38,76. Peningkatan IKTL dipengaruhi adanya penambahan ruang terbuka hijau dari 632,21 Ha menjadi 634,86.

Realisasi tahun 2019 diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= (\text{Indeks penc. air} \times 30\%) + (\text{Indeks penc. udara} \times 30\%) + (\text{Indeks tutupan lahan} \times 40\%) \\ &= (30\% \times 76,70) + (30\% \times 84,38) + (40\% \times 38,87) \\ &= 23,01 + 25,314 + 15,55 \\ &= 63,87 \end{aligned}$$

Untuk penambahan RTH ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri-industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;
- b. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat
- d. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait

2. Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW

Pada pelaksanaan tahun 2019 untuk indikator kinerja sasaran Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW mencapai realisasi 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100%. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya sudah dilakukan pengendalian melalui monitoring, pendataan dimana 100% wilayah perkotaan sudah dimanfaatkan.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2019 adalah :

1. Perlindungan dan Konservasi lingkungan hidup
2. Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup
3. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5. Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2019 sebagai Pengendalian Pemanfaatan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau Privat. Dalam penyelenggaraan tupoksi dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan rekomendasi terkait permohonan pendirian bangunan baru/rehabilitasi. Dalam hal penyediaan tanah untuk RTH Publik diarahkan/disarankan pada pemenuhan RTH Publik di masing-masing kelurahan melalui pemanfaatan dan penggunaan tanah bengkok yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing. Disamping tanah bengkok juga diutamakan pengembang untuk memenuhi RTH

Tabel III.19 Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun

RTH	Luas	Satuan
RTH Jalur Jalan Kota	57,90	Ha
RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota	59,62	Ha
RTH Lapangan Olahraga dan Makam	40,61	Ha
RTH Hutan	14,62	Ha
RTH Pengaman Jalur KA, SUTT dan Sungai	120,33	Ha
RTH Privat		
- Lahan Pekarangan	365,52	Ha
- RTH Taman	1,66	Ha
- RTH Jalur Jalan	4,67	Ha
Jumlah Total	664,93	Ha

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Misi Keempat : Meningkatkan dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**Tujuan Pertama : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat****Tabel III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
4.1.1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	3,14%	-30,38%	0,63%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	0,81	4,01
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	23,86%	23,21%	25,93%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	17,2%	17,48%	17,68%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,29%	8,63%	8,95%

Sumber Data : DPMPTSP, Badan Pusat Statistik

Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
4.1.1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	3,14%	0,63%	20%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	4,01	121,06%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	23,86%	25,93%	108,70%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	17,2%	17,68%	103,7%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,29%	8,95%	142,36%

Sumber Data : DPMPTSP, Badan Pusat Statistik

Tabel III.22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
4.1.1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,63%	-	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,01	3,92	5,28
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	25,93%	18,66%	-
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	17,68%	30,24%-	-
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	8,95%	6,36%	-

Sumber Data : DPMPTSP, Badan Pusat Statistik

Tujuan 1 Misi 4 dan Sasaran 1 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

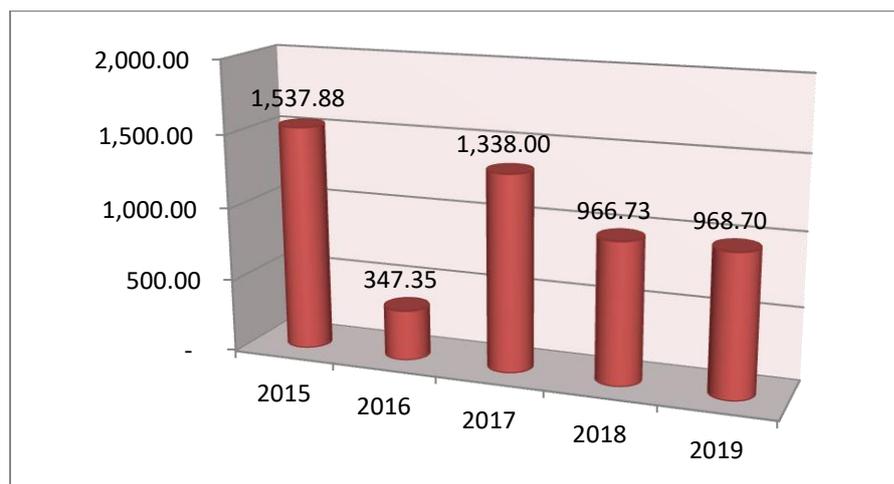
1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Pada indikator nilai realisasi investasi DPMPTSP mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.968.310.521. Dari realisasi tahun 2018 Rp. 966.733.731.153 menjadi sebesar Rp. 968.702.041.674 pada tahun 2019, Indikator nilai realisasi investasi tahun 2019 telah melebihi target RPJMD yaitu Rp. 361.000.000.000. Nilai investasi sangat bergantung pada pihak ketiga (investor) dan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga cenderung sulit diprediksi dan nilainya sangat fluktuatif. Sedangkan untuk kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Nilai investasi PMDN tahun 2019 naik sebesar 20,06% diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Investasi PMDN 2019} - \text{Realisasi investasi PMDN 2018}}{\text{Realisasi PMDN Tahun 2018}} \times 100\% \\ &= \frac{968.702.041.674 - 962.596.618.711}{962.596.618.711} \times 100\% \\ &= 0,63\% \end{aligned}$$

Perkembangan nilai investasi selama rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana grafik di bawah

Gambar III.9 Perkembangan Nilai Investasi Kota Madiun tahun 2015-2019



Sumber Data : DPMPTSP

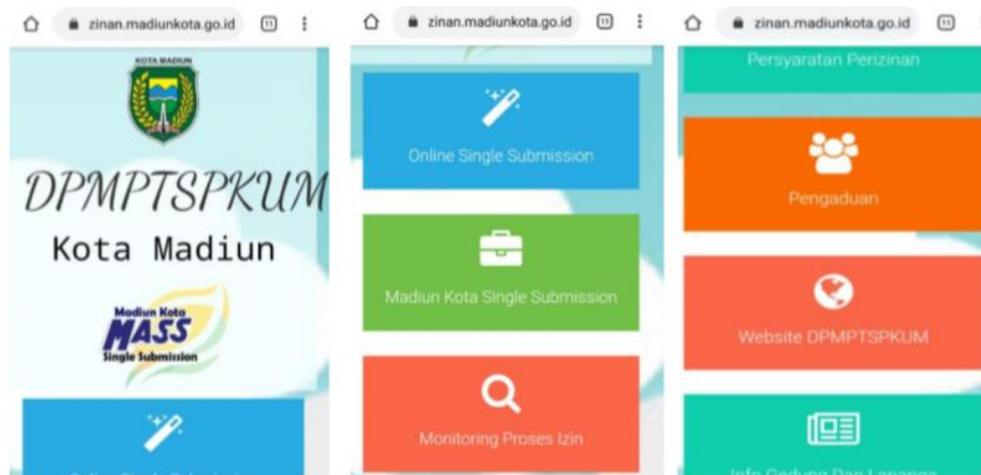
Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN di Kota Madiun dipengaruhi oleh :

1. Terbatasnya lahan di Kota Madiun, sehingga tidak memungkinkan untuk sektor industri yang besar untuk berinvestasi
2. Sektor yang dominan di wilayah Kota Madiun adalah sektor perdagangan dan jasa
3. Stabilitas politik dan keamanan
4. Suku bunga
5. Skill tenaga kerja
6. Nilai tukar rupiah
7. Kualitas sumber daya manusia
8. Perubahan regulasi dibidang perizinan

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan nilai investasi di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan promosi investasi
2. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan investasi
3. Melakukan kerjasama investasi
4. Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
5. Peningkatan pelayanan perijinan dengan membangun sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah melalui MASS (Madiun Kota Single Submission)

Gambar III.10. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah



Sumber Data : DPMPTSP

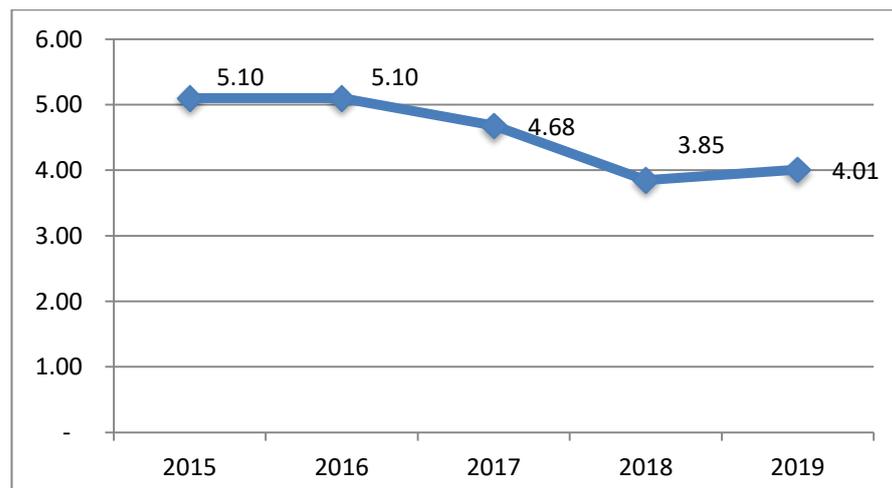
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Gambar III.11. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2015-2019



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebesar 4,01 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 3.776 orang dengan angkatan kerja sebesar 94.105 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dari TPT tahun 2018 yaitu sebesar 3,85 % atau 3.483 orang, dengan kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 293 orang. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,52 % dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.747 orang, 293 orang diantaranya belum tertampung dalam lapangan kerja dan yang 3.454 orang sudah tertampung (bekerja). Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2019 sebesar 5,08 %, realisasi TPT tahun 2019 sebesar 4,01 % maka capaian kinerja adalah sebesar 121,06%. Namun apabila Capaian Kinerja TPT lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,52 % dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel III.23. Penduduk Usia 15 Tahun Kota Madiun ke atas menurut kegiatan Agustus Tahun 2018-2019

Kegiatan	2018	2019
Angkatan Kerja	90.358	94.105
- Bekerja	86.875	90.329
- Pengangguran	3.483	3.776
Bukan Angkatan Kerja	49.932	46.917
- Sekolah	11.526	13.199
- Mengurus Rumah tangga	32708	28.445
- Lainnya	5.698	5.273
Jumlah	140.290	141.022

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Adapun jumlah pengangguran terbuka tahun 2019 sejumlah 3.776 orang tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel III.24. Kategori Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2019

No	Kategori	Jumlah
1	Tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan	2.735
2	Tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha	272
3	Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	171
4	Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja	598

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominasi oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya. Memperhatikan jumlah kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah :

- Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- Menyelenggarakan lomba cipta inovasi teknologi tepat guna dan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional dalam rangka mendorong dan memotivasi masyarakat terutama generasi muda untuk berinovasi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan



- i. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penganggutan di Kota Madiun

Selanjutnya untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah” terdiri dari 3 indikator yang berkaitan dengan sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Sektor perdagangan, industri dan pariwisata (akomodasi dan makan minum) merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir. Sektor-sektor tersebut memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena Kota Madiun merupakan pusat perdagangan serta perbelanjaan di wilayah Jawa Timur Bagian Barat. Selain itu dengan semakin berkembangnya usaha ritel seperti supermarket dan swalayan secara tidak langsung akan mampu meningkatkan peranan sektor ini.

Indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, industri dan pariwisata digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah. Persentase pertumbuhan dihitung menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yaitu dengan membandingkan selisih antara angka PDRB tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya pada masing-masing sektor tersebut, dibagi dengan angka PDRB sektor tersebut pada tahun sebelumnya dikalikan 100%.

Indikator keberhasilan untuk Misi 4 Tujuan 1 Sasaran 2 terdiri dari 3 Indikator yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan***

Besaran pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2019 adalah sebesar 25,93%. Fasilitas perdagangan yang berperan menggerakkan perekonomian di Kota Madiun diantaranya adalah tersedianya pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Aktivitas perdagangan di pasar-pasar tersebutlah yang sangat berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan. Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah



sejumlah 17 unit pasar yang tersebar dalam 3 Kecamatan di Kota Madiun, dengan salah satu diantaranya adanya Pasar Besar Madiun yang menampung pedagang dari wilayah Kota Madiun dan sekitarnya

2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Sektor industri merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Kota Madiun. Untuk capaian kinerja Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pada tahun 2019 dengan target 17,2 % dapat terealisasi sebesar 17,83% dengan capaian sebesar 103,67 % dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,48 %. Peranan terbesar pada sektor industri adalah pada sub sektor industri alat angkutan serta industri makanan dan minuman. Industri alat angkutan didominasi oleh industri besar, sedangkan industri makanan dan minuman didominasi oleh industri kecil. Melihat luas wilayah Kota Madiun yang relative kecil, pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga merupakan pilihan strategi yang lebih realistis. Beberapa pelatihan telah diberikan kepada industri kecil dan industri rumah tangga, seperti pelatihan pembuatan aneka kue maupun pelatihan pengemasan makanan yang ditujukan bagi pelaku industri makanan dan minuman. Secara umum, besarnya kontribusi sektor industri akan sangat tergantung pada kedua sub sektor tersebut. Apabila kontribusi kedua sub sektor ini naik, maka kontribusi sektor industri juga akan naik, namun manakala kontribusi kedua sub sektor ini turun, maka akan menurun pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada indicator ini dilakukan dengan :

1. Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah
2. Pelatihan profesionalisme SDM di bidang IKM (Pelatihan ANimasi) dalam bidang industry
3. Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi



4. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan dari perkembangan usaha
 5. Merencanakan dan menetapkan adanya RIPIK (Rencana Induk Pengembangan Industri Kota)
 6. Penambahan inovasi dan diversifikasi produk
 7. Memperkuat jaringan kerjasama anantara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM
 8. Peningkatan produk berorientasi ekspor
 9. Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster
 10. Melaksanakan temu bisnis untuk pola kemitraan antara industry besar dengan industry kecil
 11. Mendorong masuknya investor industry besar
3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Untuk pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Madiun pada tahun 2019 adalah sebesar 8,95%. Dikarenakan Kota Madiun tidak mempunyai destinasi wisata yang bersifat alam, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut adalah dengan mengembangkan wisata buatan maupun wisata budaya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang masih potensial untuk dikembangkan, terutama dari subsektor penyediaan akomodasi. Dengan semakin banyaknya hotel yang berdiri di Kota Madiun, seharusnya juga diimbangi dengan pengembangan berbagai fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan datang dan berkunjung ke Kota Madiun. Misalnya melalui pengembangan budaya khas Kota Madiun, pengembangan makanan khas, serta memperbanyak even-even yang diselenggarakan di Kota Madiun.

Adapun Program Kerja 2019-2020 dalam rangka meningkatkan destinasi pariwisata di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sunday Market
2. Pembangunan Patung Pendekar di Proliman Jalan Thamrin
3. Pembangunan dan penataan pusat kuliner di Jalan Rimba Kaya
4. Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima

5. Penataan Pasar Bunga
6. Penataan Pedestrian sepanjang Jalan Pahlawan
7. Pujasera Pasar Sleko
8. Penggantian pohon yang sudah tua dan lapuk dengan pohon berbunga
9. Pembangunan monumen selamat datang
10. Taman Nambangan jalan Mayjend Sungkono
11. Pembangunan Pecel Land
12. Penataan Sumber Umis dan Pasar Seni dan Sentra Oleh-Oleh
13. Menambah event-event tingkat kota, provinsi maupun nasional
14. Menyelenggarakan festival seni dan budaya

Gambar III.12. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya Kota Madiun



Sumber Data : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

15. Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan.

Tujuan Kedua : Mewujudkan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif**Tabel III.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2018 (n-1)	2019 (n)
4.1.3 Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%	100%	100%
	Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Sumber Data : Satpol PP, Bakesbangpol

Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
4.1.3 Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%	100%	102,04%
	Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Sumber Data : Satpol PP, Bakesbangpol

Tabel III.22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
4.1.3	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	-	-
		Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan	100%	-	-

Sumber Data : Satpol PP, Bakesbangpol

Sasaran Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat dengan indikator keberhasilan :

1. Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

Penghitungan rumus Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota dapat dihitung dengan menggunakan rumus : jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani dibandingkan dengan pelanggaran K3 yang masuk mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 100%. Dengan demikian indikator kinerja sasaran Angka Pelanggaran Ketertiban dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 98,95% mengalami kenaikan sebesar 1,05%.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{3.628}{3.628} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$



Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 102,04% sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019 yaitu realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 98%. Terdapat kenaikan capaian dari tahun sebelumnya yaitu 2018 sebesar 98,95 % Kenaikan ini terjadi dikarenakan bahwa isu strategis pelanggaran ketertiban umum ditahun 2019 pada pelanggaran reklame. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun untuk penataan reklame di Kota Madiun agar wilayah Kota Madiun indah dan bersih, selain itu juga menuju Kota Smartcity dimana reklame ditata sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Sehingga pelanggaran reklame yang ada baik reklame insidentil dan permanen yang sudah rusak, melanggar dan tidak berijin ditindaklanjuti oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan patroli wilayah pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan menekan angka pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah :

- a. Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengizinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Madiun. Sehingga pelanggaran reklame dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban.
- b. Sehubungan dengan implementasi Panca Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, utamanya karya membangun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Bapak Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastruktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di tempat yang telah disediakan. Seperti yang telah

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran samping untuk penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal.

- c. Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan patroli wilayah Kota Madiun utamanya di perempatan traficligh di wilayah Kota Madiun. Sehingga setiap penertiban anak jalanan diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak mengamen di lampu merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial untuk mendapatkan informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar.

2. Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan

Penghitungan rumus potensi konflik yang diselesaikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Potensi konflik yang tidak terjadi}}{\text{Potensi konflik seluruhnya}} \times 100$$

Potensi konflik seluruhnya

$$= \frac{50}{52} \times 100 = 96,15\%$$

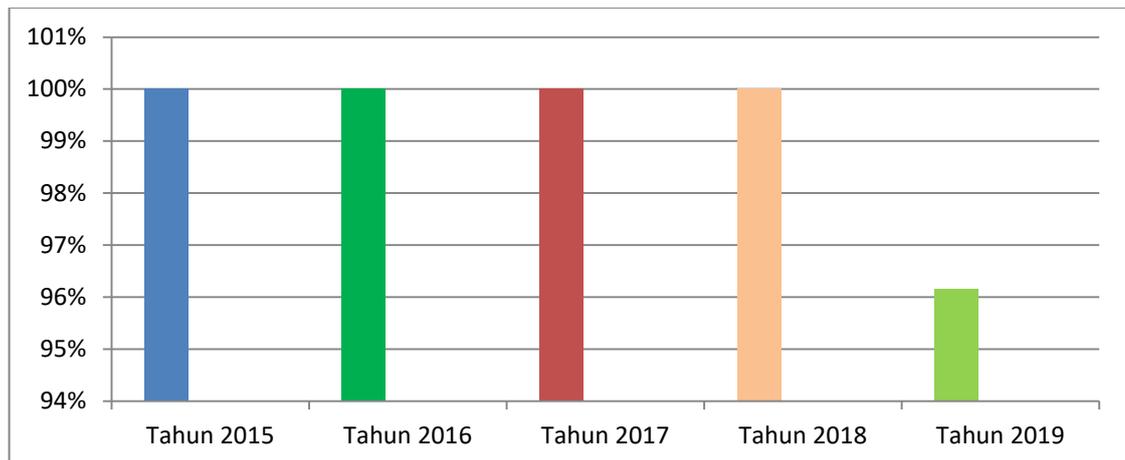
52

Pada Tahun 2019 terjadi konflik sosial di dalam tubuh Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dimana terjadi perselisihan antar 2 (dua) kubu yaitu Kubu Parapatan Luhur 2016 dan Kubu Parapatan Luhur 2017. Perselisihan terjadi di Jl Jati Wangi Kel. Klegen Kec Kartoharjo dan di Padepokan Setia Hati Terate Jl Merak Kel. Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun. Namun demikian kedua konflik sosial tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Penanganan Terpadu Konflik Sosial dan Forkopimda Kota Madiun melalui Rapat Koordinasi dan mediasi kesepakatan kedua kubu sehingga tidak menimbulkan gangguan kerawanan sosial dan kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman Kota Madiun

tetap kondusif. Sedangkan untuk kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate diserahkan kepada internal Persaudaraan Setia Hati Terate.

Trend Potensi Konflik di Kota Madiun dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar III.13. Gambar potensi Konflik di Kota Madiun Tahun 2015-2019



Sumber Data : Bakesbangpol

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik di Kota Madiun yaitu :

1. Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat, pelajar dan generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,
2. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Madiun.
3. Penyusunan Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2019, total anggaran belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.285.587.599.826,46. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 588.015.295.942,46 dan belanja langsung sebesar Rp. 697.572.303.884,00. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.23 Realisasi APBD Kota Madiun tahun 2019

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	544.763.013.542,14	406.498.220.133,46	74,62
Belanja Langsung	833.032.855.395,08	742.013.101.222,29	89,07
Total APBD	1.377.795.868.937,22	1.148.511.321.355,75	83,35

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun



Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada seluruh perangkat daerah serta program-program strategis masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program rutin dan operasional seluruh perangkat daerah adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.24 Realisasi Belanja Langsung untuk Program rutin dan operasional seluruh Perangkat Daerah

No	Program rutin operasional	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Program pendukung (4 program)	146.478.839.925,00	140.364.231.556,00	95,83

Tabel III.25 Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	2.934.974.800	2.717.653.387	92.60



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	3.065.883.782	2.697.043.863	87.97
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	102.340.000	98.581.796	96.33
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.024.657.000	867.649.175	84.68
		Indeks Kepuasan Masyarakat	732.228.000	700.883.839	95.72
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	1.736.992.000	1.659.981.518	95.57
		Tingkat keterbukaan informasi publik	28.193.568.000	27.575.061.736	97.81
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	100.461.546,38	91.182.672.181,18	90.76
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	76.879.019.000	60.320.215.640,1	78.46



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	96.749.198.360	88.957.917.483	91.95
		Rasio Rumah layak Huni	7.409.753.840	6.822.002.291,21	92.07
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	6.792.121.000	6.007.066.399	88.44
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2.383.006.000	1.936.671.097	81.27
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	775.039.920	600.656.009	77.50
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	969.231.000	820.060.472	84.61
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.133.616.380	2.876.263.672	91.79
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	7.175.045.504	5.089.678.751	70.94
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	1.152.354.000	1.039.243.495	90.18
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	2.172.902.080	1.656.267.059	76.22



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	1.936.793.000	1.547.710.672	79.91
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	869.544.716	763.543.838	87.81

Tabel III.26 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100.16	92.60	7.56
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100.27	87.97	12.3
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100	96.33	3.67
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	96	84.68	11.32
		Indeks Kepuasan Masyarakat	111.26	95.72	15.54



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	100	95.57	4.43
		Tingkat keterbukaan informasi publik	100	97.81	2.19
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	101.30	90.76	10.54
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	100.20	78.46	21.74
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	100.69	91.95	8.74
		Rasio Rumah layak Huni	100.53	92.07	8.46
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	100.69	88.44	12.25
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	93.13	81.27	11.86
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	77.50	22.5
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	20	84.61	-64.61
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	121.06	91.79	29.27
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	108.70	70.94	37.76
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	103.70	90.18	13.52
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	142.36	76.22	66.14



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	102.04	79.91	22.13
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100	87.81	12.19

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2019 pada masing-masing sasaran sudah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Dari 21 (dua puluh satu) indikator makro sasaran strategis Pemerintah Kota Madiun terdapat 3 indikator yang belum memenuhi target yaitu dengan capain kinerja di bawah 100%, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase pertumbuhan nilai investasi. Sehingga indikator yang capaian kinerjanya memenuhi maupun melampaui target yang ditetapkan adalah sebesar 85,71 % dengan realisasi anggaran sebesar 95,83%.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel di atas, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran pada Perangkat lain yang justru tidak bersentuhan secara langsung. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya capaian kinerja yang cukup tinggi pada sektor pariwisata, tentunya merupakan efek samping dari pembangunan sarana prasarana jalan dan

jembatan di Kota Madiun dan publikasi potensi Kota Madiun yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Masing-masing Perangkat Daerah saling bersinergi baik dari sisi anggaran maupun pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dengan tema pembangunan di Tahun 2019 yaitu *Konsolidasi implementasi PANCA KARYA untuk mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera*.

Dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2019-2024 yaitu Drs. MAIDI, SH, MM, MPd dan INDA RAYA AMS, SE, MIB maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024. Dengan gambaran visi misi sebagai berikut :

Gambar III.14. Visi dan Misi Walikota Madiun 2019-2024



Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun

Selain pencapaian kinerja dimaksud Pemerintah Kota Madiun telah mendapatkan penghargaan antara lain sebagai berikut :

1. Smart City
2. RKCI kategori Smart Healt dan Digital Government



3. Penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya
4. Penghargaan Pembina forum anak terbaik tingkat nasional
5. Penghargaan Kota Ramah Lansia Terbaik Kedua tingkat Provinsi
6. Juara II Pelaksanaan Gotong Royong Terbaik Provinsi 2019
7. Juara III Lomba Budaya Mutu SD Tingkat Nasional (SDN 02 Mojorejo)
8. Juara I Lomba Best Practise Kepala SD (Sri Mugi Lestari, Kepala SDN 02 Mojorejo)
9. Juara I Lomba LSS TK/RA Kategori Pencapaian Terbaik (TK Pembina)
10. Swasti Saba Wistara
11. Juara III Duta Putri Gemar Ikan Tingkat Provinsi
12. Juara I Pengawas Berprestasi
13. Juara III Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tingkat Provinsi
14. Juara II Tingkat Nasional Lomba FLSSN Kategori Solo Focal
15. Penghargaan Pembina K3 dari Gubernur Jawa Timur
16. Juara I Nasional PKBRS
17. Juara III Tingkat Provinsi Lomba Ranking Satu Kependudukan
18. Penghargaan Wahana Tata Nugraha
19. Piagam Clinical Service Improvement Project untuk RSUD Kota Madiun



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Di antara capaian 7 (tujuh) Tujuan pembangunan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 5 (lima) Tujuan dengan Capaian Sangat Baik dan 2 (dua) Tujuan dengan capaian Baik. Hal ini sudah merupakan capaian yang menggembirakan tetapi meskipun demikian perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi lebih baik terutama pada capaian indikator sasaran yang belum memenuhi target, yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

B. Permasalahan

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hal-hal yang menjadi catatan belum optimalnya capaian kinerja pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan



hasil penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 telah diformalkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019, namun belum diikuti dengan penetapan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah serta revisi Perjanjian Kinerja
- b. Rumusan tujuan dan sasaran pada sebagian Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan outcome yang diharapkan akan dicapai
- c. Pemerintah Kota Madiun telah membuat cascading kinerja dan sasaran RPJMD sampai ke sasaran Renstra Perangkat Daerah, bahkan sampai kegiatan terkait. Namun, kualitas cascading tersebut belum baik sehingga belum terjadi keselarasan antara tujuan/sasaran Perangkat Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan. Konsekuensinya adalah hasil cascading kinerja tersebut belum memperlihatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung tujuan/sasaran Perangkat Daerah.
- d. Pemerintah Kota Madiun mulai mengembangkan penggunaan aplikasi simonev, e sakip dan e planning, untuk mendukung implementasi manajemen kinerja yang lebih baik, pada tataran Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kota Madiun
- e. Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun masih belum baik, antara lain penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target belum memadai dan informasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan
- f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan Inspektorat belum mampu memicu perbaikan yang signifikan terhadap penerapan Sistem AKIP pada masing-masing Perangkat Daerah



2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Kondisi di Kota Madiun tahun 2019 nilai IKA dan IKU mengalami penurunan sedangkan IKTL mengalami kenaikan.

- a. Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh terjadinya kemarau panjang sehingga konsentrasi polutan dalam air sungai tinggi yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai yang dipantau. Selain itu angka parameter total coliform sangat tinggi di atas baku mutu, total coliform merupakan indikasi adanya limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan dalam aliran air sungai. Dimana di Kota Madiun belum ada IPLT untuk menampung limbah tinja, sehingga dimungkinkan limbah tinja dibuang ke sungai yang akan mencemari air sungai.
- b. Kemarau panjang menyebabkan tidak ada hujan yang bisa mengurangi pengendapan (pencucian) polutan di udara oleh proses yang dinamakan rain washing. Dengan kondisi udara yang stagnan, cuaca cerah, lapisan inversi suhu atau kecepatan angin yang rendah itulah memungkinkan polusi udara tetap berada di udara sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi. Selain itu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Wilayah Kota Madiun juga berpotensi meningkatkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang dapat mencemari kualitas udara.

3. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN di Kota Madiun dipengaruhi oleh :

- a. Terbatasnya lahan di Kota Madiun, sehingga tidak memungkinkan untuk sektor industri yang besar untuk berinvestasi



- b. Sektor yang dominan di wilayah Kota Madiun adalah sektor perdagangan dan jasa
- c. Stabilitas politik dan keamanan
- d. Suku bunga
- e. Skill tenaga kerja
- f. Nilai tukar rupiah
- g. Kualitas sumber daya manusia
- h. Perubahan regulasi dibidang perizinan

C. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
 - a. Melakukan penetapan RPJMD dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah
 - b. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja
 - c. Melakukan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi, untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah
 - d. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2019-2020
 - e. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran
 - f. Saat ini sedang dilakukan restrukturisasi e sakip yang diintegrasikan dengan e planning dan si monev bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika , karena waktu perpindahan server dari pihak ketiga ke Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa item yang error.



- g. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaporkan Tahun 2020, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
 - h. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/Biro Organisasi, dan study banding
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- a. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;
 - b. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat
 - d. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.



- e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan
 - f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait
3. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
- a. Melakukan promosi investasi
 - b. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan investasi
 - c. Melakukan kerjasama investasi
 - d. Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
 - e. Peningkatan pelayanan perijinan dengan membangun sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah melalui MASS (Madiun Kota Single Submission)